KATA PENGANTAR

Serangkaian proses restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan perkebunan Tahun 2020-2024 diawali dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi/organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Beberapa aturan yang mendasari Laporan Kinerja yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian dan PERMENPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Ditjen Perkebunan berdasarkan IKSP dalam PK Dirjen Perkebunan Tahun 2020 ialah 1) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan dengan indikator kinerja pertumbuhan nilai ekspor perkebunan sebesar 1,8%, 2) Penyediaan prasarana dan sarana Perkebunan yang sesuai Kebutuhan, dengan indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana perkebunan 80%, 3) Pengendalian penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan dengan indikator kinerja rasio serangan OPT Perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan sebesar 80%, dan rasio luas areal perkebunan yang ditangani dibandingkan areal terkena DPI sebesar 40%, 4) Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien dengan indikator kinerja nilai PMRB Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 32,58, 5) Pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 85,0%, 6) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 3 (skala likert). Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan pada Tahun 2020 per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 907,956,733,977,00 dari pagu Rp1.000.057.871.000,00 atau mencapai 90,79% dari pagu DIPA/POK dengan capaian fisik sebesar 92,19%.

Pelaksanaan Pembangunan perkebunan tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan kendala, namun dengan upaya percepatan dan penanganan serta langkah-langkah strategis permasalahan tersebut dapat diminimalisir dampaknya bagi pembangunan perkebunan. Hal ini bertujuan agar kegiatan pembangunan perkebunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Dokumen Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 ini tersusun berkat dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, semoga dokumen ini menjadi pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan yang memadai.

Jakarta, Februari 2021
Direktur Jenderal Perkebunan

Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.S
NIP. 196405211990031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR LAMPIRAN vi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Organisasi 3
1.3 Aspek Strategis Organisasi 9
1.3.1 Potensi Pembangunan Perkebunan 10
1.3.2 Tantangan Pembangunan Perkebunan 12
1.3.3 Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Ruang Lingkup Sektor Pertanian . 13
1.3.4 Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Ruang Lingkup Sub Sektor Perkebunan 13
1.4 Aspek Sumber Daya Manusia 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 16
2.1 Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 16
2.1.1 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 17
2.1.2 Program dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Perkebunan 22
2.1.3 Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 23
2.1.4 Kaitan Kegiatan dengan Fokus Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2020-2024 23
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 29
2.2.1 Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 29
2.3 Perjanjian Kinerja 34

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 38
3.1 Capaian Kinerja 38
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 40
3.2.1. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan 41
3.2.2 Sasaran Tingkat Kemanfaatan Sarana Perkebunan 45
3.2.3 Sasaran Rasio Luas Serangan OPT Terkendali dan Area Terkena DPI Tertanggulangi terhadap Luas Lahan Terserang OPT dan Berpotensi Terkena DPI 49
3.2.4 Sasaran Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien 55
3.2.5 Sasaran Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas 58
3.2.6 Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Ditjen Perkebunan 61
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2020 64
3.3.1 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama 64
3.3.2 Penyerapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja 65
3.3.3 Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan Ditjen Perkebunan 65
3.3.4 Realisasi Anggaran Berdasarkan Satker Lingkup Ditjen Perkebunan 68
3.3.5 Permasalahan Umum Realisasi Anggaran Tahun 2020 69

BAB IV PENUTUP 71

LAMPIRAN 71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Pegawai Berdasar Golongan 14
Tabel 2. Pegawai Berdasar Gender/Jenis Kelamin 14
Tabel 3. Pegawai Berdasar Pendidikan 15
Tabel 4. Sasaran Kegiatan Berdasarkan Output Tahun 2020 29
Tabel 5. Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2020 30
Tabel 6. Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2020 30
Tabel 7. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 31
Tabel 8. Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2020 31
Tabel 9. Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2020 32
Tabel 10. Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2020 33
Tabel 11. Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan Tahun 2020 34
Tabel 12. Perkembangan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 35
Tabel 13. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 (Desember 2020) 36
Tabel 14. Capaian Kinerja Ditjen Perkebunan Tahun 2020 Berdasarkan Perjanjian Kinerja 39
Tabel 15. Target dan Capaian Sasaran Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Tahun 2020 41
Tabel 16. Realisasi Volume dan Nilai Ekspor Tahun 2020 42
Tabel 17. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perkebunan Tahun 2019-2020 43
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Nilai Ekspor Komoditi Perkebunan 2016-2020 43
Tabel 19. Tingkat Kemanfaatan Sarana Perkebunan Tahun 2020 45
Tabel 20. Uraian Tingkat Kemanfaatan Sarana Perkebunan Tahun 2020 46
Tabel 21. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Kegiatan Pendukung Dalam Mencapai Volume Ekspor Komoditas Unggulan Perkebunan Tahun 2020 48
Tabel 22. Capaian Sasaran Terkendalinya Penyerangan OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan 49
Tabel 23. Rasio Serangan OPT Perkebunan yang Ditangani Terhadap Luas Serangan Tahun 2020 50
Tabel 24. Rasio Luas Area Perkebunan yang Ditangani Dibandingkan Area Terkena DPI Tahun 2020 51
Tabel 25. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Penggunaan Anggaran) dan Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Capaian ataupun Kegagalan 54
Tabel 26. Capaian Sasaran Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien 55
Tabel 27. Evaluasi dan Analisis Realisasi Nilai AKIP yang Diberikan Oleh Itjen Kementerian Pertanian Pada Tahun 2020 56
Tabel 28. Capaian Sasaran Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas 58
Tabel 29. Evaluasi dan Analisis Nilai Kinerja (NK) Ditjen Perkebunan Tahun 2020 59
Tabel 30. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan 2020 61
Tabel 31. Evaluasi dan Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 – 2020 61

Tabel 32. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Kegiatan Utama dalam Mencapai Target Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan 63
Tabel 33. Realisasi dan Capaian Fisik Kegiatan Ditjen Perkebunan Tahun 2020 Berdasarkan Kegiatan Utama 64
Tabel 34. Serapan dan Capaian Fisik Kegiatan Ditjen Perkebunan Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan 3
Gambar 2. Kerangka Strategis Pembangunan Perkebunan Nasional 18
Gambar 3. Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan 2020 - 2024 22
Gambar 4. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART 2020 59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan 712
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan 76
Lampiran 3. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 79
Lampiran 4. Realisasi Berdasarkan *Output* Kegiatan Ditjen Perkebunan Tahun 2020 80
Lampiran 5. Realisasi Berdasarkan Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 87
Lampiran 6. Perkembangan Realisasi *MoU* Bidang Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2020 93
Lampiran 7. Hasil Reviu LAKIN Ditjen Perkebunan Tahun 2020 95

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke-generasi. Pada tahun 2020-2024, sub sektor perkebunan masih menjadi sub sektor penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Peran strategis sub sektor perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang PDB; nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bio energi yang bersifat terbarukan; berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Sejalan dengan berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk usaha budidaya perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasaranaa input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, juga menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat yang berat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara

optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal perencanaan dan penganggaran diamanatkan mengikuti pembagian kewenangan pusat dan daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan.

Undang-undang tersebut memasukkan bidang-bidang terkait sub sektor perkebunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah seperti tenaga kerja, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, pangan, lingkungan hidup dan pertanahan sebagai urusan wajib yang tidak terkait pelayanan. Implikasi penetapan urusan pertanian sebagai urusan pemerintah bersifat pilihan khususnya sub sektor perkebunan yang memiliki kekhasan komoditas sesuai potensi unggulan daerah akan membuka peluang negosiasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menentukan pembagian kewenangan sub sektor perkebunan yang tepat dan disesuaikan dengan kebijakan program, anggaran dan regulasi yang efektif dan efisien.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah, diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memadai. SAKIP yang memadai harus mengandung unsur Perencanaan Kinerja (Renstra, RKT, PK), Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pemanfaatan Informasi Kinerja. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai salah satu unsur penting dalam SAKIP disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Format yang terdiri dari: 1) Bab I Pendahuluan; 2) Bab II Perencanaan Kinerja; 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja yang meliputi: (a) Capaian Kinerja Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja; (b) Realisasi Anggaran yang digunakan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja; 4) Bab IV Penutup dan Lampiran. Di dalam Bab III juga membahas 1) capaian terhadap target tahun berjalan; 2) capaian kinerja dibandingkan dengan tahun lalu/beberapa tahun sebelumnya; 3) capaian kinerja terhadap Renstra dan PK; 4) membandingkan capaian kinerja dengan standar nasional; 5) analisis keberhasilan dan penyebab kegagalan; analisis atas efesiensi penggunaan sumberdaya; serta 7) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

1.2 Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Pertanian terkait nomenklatur organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan, dalam melaksanakan tugasnya yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkebunan. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya serta pelidungan perkebunan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya serta pelindungan perkebunan;
3. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perbenihan, dan sarana produksi budidaya serta perlindungan perkebunan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya serta perlindungan perkebunan;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Perbenihan, Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan tertera pada gambar berikut:

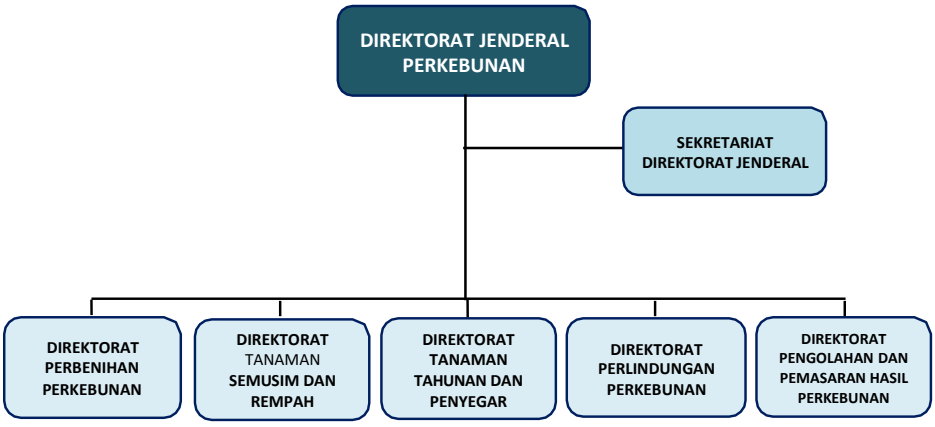

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1) **Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan,** mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, dan menyelenggarakan fungsi:
   a. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang perkebunan;
   b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
   c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
   d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan;
   e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

2) **Direktorat Perbenihan Perkebunan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih tebu dan tanaman perkebunan lain, dan menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih;
   b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih;
   c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih;
   d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih;
   e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih; dan
   f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan.

3) **Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tebu, semusim dan rempah lain, dan menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala, dan cengkeh serta rempah dan semusim lain;
   b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala, dan cengkeh serta rempah dan semusim lain;
   c. Penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala, dan cengkeh serta rempah dan semusim lain;
   d. Pengembangan bahan baku bio energi tanaman tebu;
   e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala, dan cengkeh serta rempah dan semusim lain;
   f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala, dan cengkeh serta rempah dan semusim lain;
   g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah.

4) **Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tahunan dan penyegar, dan menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar;
   b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar;
   c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar;
   d. Pengembangan bahan baku bio energi kelapa sawit;
   e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar; dan
   f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar.

5) **Direktorat Perlindungan Perkebunan,** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan, dan menyelenggarakan fungsi :
   a. Pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
   b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
   c. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
   d. Pelaksanan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
   e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
   f. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
   g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
   h. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

6) **Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan,** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, dan menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu dan pembinaan usaha serta pemasaran hasil perkebunan;
   b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu dan pembinaan usaha serta pemasaran hasil perkebunan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu dan pembinaan usaha serta pemasaran hasil perkebunan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;
f. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan standar mutu di bidang perkebunan; dan
g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

7) **Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki 4 UPT Pusat** yang berada di daerah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08,09,10,11/Permentan /OT.140/2/2008, tanggal 9 Februari 2008 status setara Eselon II.b yaitu Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, Medan, dan Ambon, satu yang statusnya setara Eselon II.b Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak.

Kedudukan dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perkebunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan, pembinaan teknis bidang perbenihan dilaksanakan oleh Direktur Perbenihan dan Sarana Produksi, dan bidang proteksi dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan.

Tugas pokok BBPPTP Surabaya, Medan, dan Ambon adalah melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih, dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium. Sedangkan BPTP Pontianak mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, BBPPTP Surabaya, Medan, dan Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional;
b. Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor, dan yang akan di ekspor, serta rekayasa genetika;
c. Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;

d. Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas;
e. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar;
f. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;
g. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (*referee fest*);
h. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
i. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;
j. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
k. Pengembangan teknik *surveillance* OPT penting;
l. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
m. Pelaksanaan eksplorasi dan iventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
n. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan , penilaian kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;
o. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
p. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
q. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;
r. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
s. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
t. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
u. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
v. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Sedangkan BPTP Pontianak dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
b. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;

c. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
d. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;
e. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
f. Pelaksanaan eksplorasi dan iventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
g. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;
h. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
i. Pelaksanaan pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati;
j. Pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
k. Pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
l. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
m. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Secara umum isu strategis sub sektor yang saat ini masih berlangsung, usaha perkebunan strategis nasional dalam kawasan maupun non kawasan serta komoditas unggul daerah saat ini masih didominasi oleh perkebunan rakyat yang mencapai lebih dari 90%. Namun demikian, secara umum produktivitas tanaman perkebunan saat ini masih rendah, misalnya produktivitas kopi yang hanya 0,78 ton/ha; kakao 0,80 ton/ha, karet 1,2 ton/ha ; sawit 3,1 ton/ha. Hal ini terjadi karena beberapa sebab antara lain kondisi tanaman yang sudah tua, penggunaan benih asalan, penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Manufacturing Practice* (GMP) yang belum optimal.

Bersamaan dengan itu, luas areal kebun rakyat yang perlu diremajakan/direhabilitasi karena tanamannya sudah tua dan/atau rusak sangat luas, yaitu mencapai 1,742 Juta ha atau 11,2% dari luas perkebunan rakyat strategis nasional. (Renstra Ditjenbun, 2020-2024). Dalam pelaksanaan peremajaan tanaman perkebunan, bibit atau bahan tanam merupakan pintu masuk yang akan menentukan produktivitas dan kualitas produk usaha pekebun dalam jangka panjang atau satu musim tanam yang umumnya mencapai 25 tahun. Kesalahan penggunaan bahan tanam akan menimbulkan kerugian petani selama kurun waktu tersebut. Oleh sebab itu, penyediaan bahan tanam merupakan prioritas

pembangunan perkebunan, meskipun dalam pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan penyediaan input produksi lain; modal finansial; serta peningkatan SDM petani (jumlah dan kapabilitas).

Mencermati isu-isu strategis di atas, Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai representasi Pemerintah menaruh perhatian penuh *(concern)* terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan selalu berupaya memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi melalui program-program pembangunan perkebunan yang berorientasi pada peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing komoditi perkebunan secara berkelanjutan. Aspek strategis organisasi ini didukung oleh adanya potensi pembangunan perkebunan yang ada, di tengah tantangan yang dihadapi. Eksistensi organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan sangat strategis dalam mengoptimalkan dan memberdayakan potensi perkebunan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan tantangan yang dihadapi melalui kebijakan dan program pembangunan perkebunan.

1.3.1 Potensi Pembangunan Perkebunan

Pembangunan perkebunan ke depan akan tetap berfungsi sebagai salah satu pilar ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang signifkan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai salah satu pilar ekonomi, perkebunan ditopang oleh beberapa potensi antara lain:

a. **Keanekaragaman hayati melimpah sebagai negara tropis.** Sebagai negara tropis maka Indonesia secara alami merupakan Kawasan dengan efektivitas dan produktivitas yang tinggi dalam pemanenan dan transformasi energi matahari menjadi bio-massa dan *feedstock bio-industry*. Kondisi ini juga dapat menjadi basis keunggulan kompetitif dalam *bioeconomic*;
b. **Pengembangan bio-economic.** Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dalam bentuk komoditas pangan dan perkebunan sebagai sumber pemanfaatan *bio-economic*. *Bio-economic* mengacu pada semua aktivitas ekonomi menggunakan sumberdaya hayati untuk menghasilkan bahan kimiawi, material dan bahan bakar nabati untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pengembangan *bio-economic* dipacu oleh semakin tingginya tuntutan atas produk pangan berkualitas termasuk *functional food*;
c. **Peningkatan permintaan dunia terhadap 4F Crops (Food, Feed, Fiber and Fuel).** Komoditas perkebunan di Indonesia memiliki peluang untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan manusia (*food*), sumber pakan ternak (*feed*), kebutuhan serat pangan (*fiber*) untuk pupuk organik dan bahan bakar biomassa dan kebutuhan minyak nabati (*fuel*) untuk kebutuhan bahan bakar nabati (BBN). Peluang ini perlu dimanfaatkan karena semakin tingginya permintaan dunia akan produk 4F Crops yang ramah lingkungan sebagai implikasi dari menipisnya cadangan fosil di dunia.

d. **Kecenderungan baru penghargaan atas jasa lingkungan dan jasa amenity.**
Lahan perkebunan tidak hanya penghasil bahan makanan, serat dan energi tetapi juga mempunyai multifungsi yang menghasilkan jasa lingkungan dan jasa *amenity*. Jasa lingkungan dan jasa *amenity* lahan perkebunan antara lain penyedia sumber air tanah dan oksigen, pengendali banjir, pencegah erosi/longsor dan sedimentasi, mempertahankan suhu udara, mendaur ulang limbah, menjaga kualitas udara/ purifkasi, pengatur tata air dan menjaga keberadaan sumber daya air, memitigasi perubahan iklim, sumber keindahan dan kenyamanan, pelestari keanekaragaman hayati, pelestari budaya pedesaan, dan sebagainya.

e. **Perkembangan inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi pertanian/perkebunan**
Perkembangan diseminasi teknologi kepada petani/pekebun lebih mudah dilakukan karena umumnya petani/pekebun tertarik kepada hal-hal yang bersifat inovatif, namun tingkat adopsi masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena produk yang dihasilkan dengan mengadopsi teknologi baru tidak mendapatkan insentif atau nilai tambah artinya harga yang diterima tidak berbeda jauh dengan harga produk tanpa teknologi baru.

f. **Ketersediaan sumber daya lahan dan kesesuaian agro-ecosystem.**
Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Total luas daratan Indonesia sebesar 192 juta hektar, terbagi atas 123 juta hektar (64,6%) kawasan budidaya dan 67 juta hektar sisanya (35,4%) merupakan kawasan lindung. Dari total luas kawasan budidaya di daratan yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta hektar, meliputi lahan basah 25,6 juta hektar; lahan kering tanaman semusim 25,3 juta hektar dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta hektar. Sampai saat ini dari areal yang berpotensi untuk pertanian, yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian sebesar 47 juta hektar sehingga masih tersisa 54 juta hektar yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian.

g. **Distribusi dan aksesibilitas pemanfaatan sumber daya air.**
Ketersediaan sumber daya air nasional (*annual water resources*/AWR) masih sangat besar, terutama di wilayah barat, akan tetapi tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Sebaliknya di sebagian besar wilayah timur yang radiasinya melimpah dan curah hujan rendah (<1.500 mm per tahun) hanya terdistribusi selama 3-4 bulan. Total pasokan atau ketersediaan air wilayah (air permukaan dan air bumi) di seluruh Indonesia adalah 2.110 mm per tahun setara dengan 127.775 m^3 per detik. Indonesia dikategorikan sebagai negara kelompok 3 berdasarkan kebutuhan dan potensi sumber daya airnya yang membutuhkan pengembangan sumberdaya 25-100% dibanding kondisi saat ini.

h. **Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI).**
SDI ini dapat menjadi salah satu keunggulan kompetitif perkebunan Indonesia yang merupakan pelaksana penggerak proses produksi dan pengembangan rantai nilai.

Adanya potensi permbangunan perkebunan tersebut merupakan modal penting dalam pelaksanan pembangunan perkebunan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam upaya mengoptimalkan pembangunan perkebunan, maka pembangunan perkebunan dilaksanakan dalam kerangka pembangunan kawasan. Pengembangan kawasan perkebunan sesuai dengan Permentan 18/2018 tentang kawasan pertanian berbasis korporasi, kawasan perkebunan dapat berupa kawasan yang secara historis telah eksis maupun lokasi baru yang sesuai tipologi agroekosistem dan persyaratan budidaya bagi masing-masing jenis komoditas perkebunan. Kriteria khusus kawasan perkebunan mencakup berbagai aspek teknis yang bersifat spesifik komoditas, baik untuk tanaman tahunan dan penyegar, tanaman semusim dan rempah. Kriteria khusus kawasan perkebunan, yaitu sebagai berikut:

1) Pengusaha perkebunan dilakukan dalam bentuk usaha. Perkebunan rakyat dan/atau usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi;
2) Pengusaan pekebunan besar dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan usaha perkebunan rakyar secara berkelanjutan, baik melalui pola perusahaan inti-plasma, kerjasama kemitraan perkebunan rakyat-perusahaan mitra, kerjasama pengolahan hasil dan/atau bentuk-bentuk kerjasama lainnya;
3) Arah pengembangan usaha perkebunan dilaksanakan dalam bingkai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya: kelapa sawit, dengan penerapan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), kakao dengan penerapan *sustainable cocoa* dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan lainnya.

1.3.2 Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Lingkup Global

Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Ruang Lingkup Global Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan ke depan dalam ruang lingkup global terutama berkaitan dengan liberalisasi pasar global yang dapat diklasifikasikan yaitu:

1. Liberalisasi perdagangan global (implikasi pertemuan WTO, APEC, G20 dan kerjasama bilateral/multilateral/regional lainnya);
2. Kondisi perekonomian global yang menimbulkan gejolak harga dunia (implikasi negatif era pasar bebas ASEAN/AEC 2015);
3. Tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk (implikasi dari tuntutan daya saing komoditas);
4. Perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi terhadap munculnya bencana alam dan peningkatan serangan OPT);
5. Dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (implikasi terhadap pembangunan perkebunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan);

6. Tingginya tingkat permintaan akibat ledakan jumlah penduduk dan urbanisasi (implikasi terhadap ketersediaan bahan baku);
7. Aspek distribusi/pengangkutan dan pemasaran (implikasi dari globalisasi produksi dan pasar)

1.3.3 Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Lingkup Nasional

Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan ke depan dalam ruang lingkup sektor pertanian terutama berkaitan dengan kondisi pertanian secara umum dapat diklasifikasikan yaitu:

a. Penurunan minat generasi muda terhadap budidaya pertanian/ perkebunan (implikasi terbatasnya sumber daya insani (SDI) pertanian/perkebunan);
b. Adanya alih fungsi lahan pertanian mejadi peruntukan lain atau dari satu komoditi menjadi komoditi lain;
c. Pembangunan pertanian difokuskan pada pengembangan Kawasan dengan korporasi petani. Dalam pengembangan Kawasan dan korporasi akan dihadapkan pada pengoptimalan berbagai aspek, baik fisik maupun non fisik;
d. Adanya anomali iklim yang patut diantisipasi dalam upaya pelaksanaan pembangunan perkebunan;
e. Ketersediaan benih dan sarana produksi (implikasi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan) yang belum optimal;
f. Keterbatasan, penurunan kualitas, status kepemilikan, persaingan pemanfaatan, degradasi dan konversi/ alih fungsi lahan (implikasi permasalahan umum sumber daya lahan berkelanjutan);
g. Peningkatan kemampuan pekebun dalam usaha agribisnis perkebunan);
h. Kondisi tanaman tua dan tanaman dengan produktivitas rendah;
i. Tuntutan penerapan konsep pembangunan perkebunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
j. Tuntutan pengaturan perizinan usaha perkebunan;
k. Konflik dan gangguan usaha perkebunan (implikasi keamanan, kenyamanan berusaha serta penciptaan minat dan iklim investasi).

1.4 Aspek Sumber Daya Manusia

Pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan sampai dengan 31 Desember 2020 berjumlah sebanyak 921 orang yang tersebar pada 6 unit kerja eselon II di Kantor Pusat dan 4 Unit Pelaksana Teknis (3 BBPPTP & 1 BPTP). Data pegawai didasarkan pada Golongan Kepangkatan, didasarkan pada Gender/Jenis Kelamin dan didasarkan pada Pendidikan beserta persebarannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Pegawai Berdasar Golongan

NO.	UNIT KERJA	DISTRIBUSI GOLONGAN				
		I	II	III	IV	JUMLAH
1	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	0	0	0	1	1
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	0	17	98	14	129
3	DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN	0	2	34	14	50
4	DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH	0	2	27	11	40
5	DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR	0	4	29	11	44
6	DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	0	1	39	7	47
7	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN	0	2	36	11	49
8	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN MEDAN	1	12	179	13	205
9	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	0	7	132	19	158
10	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN AMBON	0	33	90	3	126
11	BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK	0	19	49	4	72
TOTAL PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN		**1**	**99**	**713**	**108**	**921**

Sumber : Sekretariat Ditjenbun, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Ditjen Perkebunan merupakan golongan III sebanyak 713 atau 77,42%, disusul IV sebanyak 108 orang atau 24,55%. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Pegawai Berdasar Gender/Jenis Kelamin

NO.	UNIT KERJA		JENIS KELAMIN		JUMLAH
		JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1	1	0	1
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	129	71	58	129
3	DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN	50	21	29	50
4	DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH	40	23	17	40
5	DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR	44	26	18	44
6	DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	47	22	25	47
7	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN	49	22	27	49
8	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN MEDAN	205	99	106	205
9	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	158	87	71	158
10	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN AMBON	126	77	49	126
11	BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK	72	51	21	72
TOTAL PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN		**921**	**500**	**421**	**921**

Sumber : Sekretariat Ditjenbun, 2020

Dari tabel di atas dapat dlihat bahwa sebagian besar pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan adalah laki-laki dengan jumlah 500 orang atau 54,29% dan perempuan berjumlah 421 atau 45,71%.

Selain berdasarkan golongan dan jenis kelamin, distribusi pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan tingkat Pendidikan disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Pegawai Berdasar Pendidikan

NO.	UNIT KERJA	DISTRIBUSI PENDIDIKAN										
		S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
1	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1	26	63	0	1	6	0	0	27	2	3
3	DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN	1	20	24	0	0	1	0	0	4	0	0
4	DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH	0	16	20	1	0	1	0	0	1	1	0
5	DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR	0	18	18	0	0	3	0	1	3	1	0
6	DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	0	15	20	0	0	3	0	1	8	0	0
7	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN	1	19	23	0	0	2	0	0	3	0	1
8	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN MEDAN	0	25	106	11	0	4	0	15	42	1	1
9	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	1	36	95	0	1	8	0	3	12	1	1
10	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN AMBON	0	4	39	8	0	7	0	7	61	0	0
11	BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK	0	3	32	2	0	11	0	7	17	0	0
TOTAL PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN		**5**	**182**	**440**	**22**	**2**	**46**	**0**	**34**	**178**	**6**	**6**

Sumber : Sekretariat Ditjenbun, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawan Direktorat Jenderal Pekrbunan ialah lulusan Sarjana (S1) dengan jumlah 440 orang atau 47,77%, disusul lulusan S2 sebanyak 182 orang (36,4%), dan SLTA sebanyak 178 orang (19,33%).

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024

Selama periode 2015-2019, sektor pertanian menjadi sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Agenda prioritas Kabinet Kerja "NAWACITA" khususnya nawacita ke-6 yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Nawacita ke-6 ini mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di antaranya: mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri dan melindungi serta mensejahterateraterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

RPJMN tahun 2020-2024 mengusung tema pembangunan **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".** Tema pembangunan tersebut sekaligus menjadi Visi Presiden dalam pembangunan nasional tahun 2020-2024. Tema pembangunan ini dilaksanakan melalui 7 agenda pembangunan yang merupakan Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV tahun 2020-2024. Ketujuh PN tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kementerian Pertanian diharapkan dapat berkontribusi dalam PN 1, "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan". Untuk mewujudkannya, maka Kementerian Pertanian secara konkrit memberikan kontribusi dalam Program Prioritas (PP) 3, "Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan" dan PP 6, "Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi".

Sesuai dengan kontribusi Kementerian Pertanian pada PN 1,3 dan 6, kontribusi pada PN 1 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Untuk mewujudkannya, Direktorat Jenderal Perkebunan secara konkrit memberikan kontribusi pada Program Prioritas, "Nilai tambah dan daya saing industri:" Program Prioritas (PP) 3, "Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan" dan PP 6, "Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi". Sasaran Program Peningkatan nilai tambah dan daya saing

industri antara lain meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan, tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan dan terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan. Peningkatan lapangan kerja antara lain dilakukan dengan fasilitasi kegiatan berupa pemberian upah (HOK) pada program dukungan pengembangan tanaman tahunan dan penyegar, tanaman semusim dan rempah, dukungan perbenihan dan perlindungan perkebunan.

2.1.1 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024

Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah "Indonesia berpendapatan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan". Dari visi tersebut, diturunkan beberapa Program Nasional yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan nasional periode 2020-2024. Kementerian Pertanian berkontribusi pada Program Nasional (PN) 1, yaitu "Penguatan Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas", dengan 2 (dua) Program Prioritas, yaitu: PP 3 (Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan) & PP 6 (Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi). Kementerian Pertanian juga telah menentukan 5 (lima) arah kebijakan dan strategi, yaitu: 1) Terjaganya ketahanan pangan nasional; 2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian; 3) Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasaranaa dan sarana pertanian; 4) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian; serta 5) Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.

Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 – 2024 ialah "**Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan serta kebutuhan ekspor komoditas perkebunan dalam memperkuat stuktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing".** Misi ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan akan fokus dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri serta pemenuhan kebutuhan ekspor luar negeri. Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan ekspor pertanian secara keseluruhan. Hal ini dilakukan guna memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing sesuai Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024.

Berlandaskan pada hal tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan 6 (enam) kegiatan di tingkat Direktorat Jenderal, yaitu: 1) Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman; 2) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan; 3) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar

dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan; 4) Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI; 5) Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan; serta 6) Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Keenam Berjalannya rencana strategis ini, sangat erat kaitannya dengan regulasi dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kedua hal tersebut menjadi faktor pendukung. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Perkebunan 2020-2024 digambarkan pada gambar 2 berikut:

Gambar 2. Kerangka Strategis Pembangunan Perkebunan Nasional

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan berupaya untuk mencapai 2 (dua) hasil akhir sebagai bagian kontribusi atas pembangunan pertanian nasional, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan yang semakin meningkat serta ekspor produk perkebunan yang semakin meningkat. Kedua hal tersebut akan terwujud apabila produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing dapat terwujud sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional. Terwujudnya atap strategi berupa produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing tersebut tidak lepas dari peran penting keempat pilar strategis Direktorat Jenderal Perkebunan yang salin bersinergi dan terintegrasi.

Pilar pertama adalah perbenihan tanaman perkebunan, diharapkan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dapat terwujud. Ketersediaan dan kualitas benih yang memadai akan sangat mempengaruhi produksi tanaman perkebunan. **Pilar kedua** adalah budidaya tanaman perkebunan. Efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan best practice budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice (GAP)*. **Pilar ketiga** adalah pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. **Pilar keempat** adalah jaminan mutu. Peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan menjadi hal penting yang harus diwujudkan. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

Dalam mendukung pilar pembangunan perkebunan tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan melaksanakan beberapa kegiatan prioritas antara lain:

1. **Kegiatan 1:** Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman.

   Dalam rangka mewujudkan produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional, perlu dilakukan pengelolaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas untuk memastikan ketersediaan dan kualitas benih yang memadai. Kualitas benih yang baik akan mempengaruhi produktivitas tanaman perkebunan, yang pada akhirnya menigkatkan produksi tanaman perkebunan. Selain itu, pengelolaan benih juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan tanaman perkebunan.

2. **Kegiatan 2:** Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan. Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman semusim dan rempah. Terdapat beberapa

komoditas tanaman semusim dan rempah yang menjadi fokus Ditjen Perkebunan untuk tahun 2020-2024, yaitu: tanaman tebu, tembakau, dan kapas untuk pengendali impor, serta tanaman lada, pala, nilam, sereh wangi, akar wangi, cengkeh, gambir, dan vanili untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

3. **Kegiatan 3:** Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan. Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman tahunan dan penyegar. Terdapat beberapa komoditas tanaman tahunan dan penyegar yang menjadi fokus Ditjen Perkebunan untuk tahun 2020-2024, yaitu: tanaman kemiri sunan dan sagu untuk pengendali impor, serta tanaman kopi, kelapa sawit, karet, jambu mete, kakao, kelapa, teh, dan aren untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

4. **Kegiatan 4:** Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. Penanggulangan terhadap serangan OPT dilakukan melalui tindakan pencegahan (preventif) dan tindakan pengendalian (kuratif), sedangkan upaya penanggulangan terhadap serangan DPI dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap DPI. Indikator serangan yang diukur adalah kejadian serangan OPT dan DPI yang tidak melebihi 2% dari total luas areal tanaman Tanaman Menghasilkan (TM) dan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).

5. **Kegiatan 5:** Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan

   Kegiatan peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan merupakan hal penting yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan nasional sesuai amanat RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan

pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

6. **Kegiatan 6:** Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan secara selaras dengan roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik. Kegiatan "Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian" merupakan kontribusi Ditjen Perkebunan dalam mendukung upaya Kementerian Pertanian Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, yang dilaksanakan melalui strategi:
   a) Mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN;
   b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; serta
   c) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

2.1.2 Program dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Perkebunan

Sasaran Program	IKSP	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan	1. Peningkatan nilai ekspor untuk produk perkebunan	%	1,80	1,82	1,85	2,00	2,10
2. Tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan	2. Tingkat kemanfaatan sarana perkebunan	Indek	80,00	80,50	81,50	81,50	82,00
3. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan	3. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan	%	80	80	80	80	80
	4. Rasio luas area perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	%	40	40	40	40	40
4. Terselenggaranya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien	5. Nilai PMPRB Diektorat Jenderal Perkebunan	Nilai	32,58	32,62	32,72	32,75	32,91
5. Terselenggaranya Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas	6. Nilai Kinerja Anggaran (NK) Diektorat Jenderal Perkebunan		85	85	85	85	85
6. Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan	7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3

Gambar 3. Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan 2020 - 2024

Setiap capaian indikator yang merepresentasikan tercapainya satu sasaran, berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi, pada akhirnya dapat menjadi tolak ukur capaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan. Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 – 2024. Lebih detail mengenai target kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan dapat dilihat pada Gambar 3 di atas.

Dari gambar di atas menunjukkan target kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan untuk periode 2020-2024. Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki 6 (enam) sasaran program yang capaiannya diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran program. Setiap indikator kinerja sasaran program memiliki target tahunan yang harus dicapai. Capaian dari target indikator kinerja sasaran program tersebut merupakan cerminan capain kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan pada tiap tahun pengukuran.

2.1.3 Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024

Berlandaskan pada hal tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan 6 (enam) kegiatan di tingkat Direktorat Jenderal, yaitu:

a) Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman;
b) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
c) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
d) Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI;
e) Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan; serta
f) Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Keenam kegiatan yang ada pada rencana strategis ini, sangat erat kaitannya dengan regulasi dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kedua hal tersebut menjadi faktor pendukung

2.1.4 Kaitan Kegiatan dengan Fokus Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2020-2024

Kaitan antara kegiatan pembangunan perkebunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dengan fokus kegiatan yang ditetapkan tercantum dalam Renstra Eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan sebagai berikut:

A. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

Prioritas pengembangan tanaman semusim dan rempah difokuskan pada 7 komoditas unggulan perkebunan yaitu Tebu, Lada, Pala, Cengkeh, Kapas, Tembakau dan Nilam. Selain itu difasilitasi pengembangan komoditas spesifik lokal seperti tanaman pemanis lain, tanaman serat, tanaman atsiri, tanaman rempah dan semusim lainnya. Sasaran peningkatan produksi tanaman semusim dan rempah adalah **terlaksananya pengembangan tanaman semusim dan rempah** dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2020-2024 adalah:

1) *Pengembangan areal produktif tanaman tebu*, yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain;
2) *Pengembangan areal produktif tanaman rempah* (Lada, Pala, Cengkeh, tanaman rempah dan tanaman atsiri lainnya), yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh; Sub Direktorat Tanaman Rempah dan Semusim Lain; dan Sub Direktorat Tanaman Serat dan Atsiri.
3) *Pengembangan areal produktif tanaman semusim lainnya* (kapas, tembakau, nilam, tanaman pemanis lain, tanaman serat dan semusim lain); yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain; Sub Direktorat Tanaman Rempah dan Semusim Lain; dan Sub Direktorat Tanaman Serat dan Atsiri.
4) *Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering*; yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain; Sub Direktorat Tanaman Rempah dan Semusim Lain; Sub Direktorat Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh; dan Sub Direktorat Tanaman Serat dan Atsiri.
5) *Fasilitasi teknis pengembangan tanaman semusim dan rempah*, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain; Sub Direktorat Tanaman Rempah dan Semusim Lain; Sub Direktorat Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh; Sub Direktorat Tanaman Serat dan Atsiri; dan Sub Bagian Tata Usaha serta kelompok jabatan fungsional.

B. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Program Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar lebih diprioritaskan untuk peningkatan produksi melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan dan pemberian pelayanan yang berkualitas. Fasilitasi dan pembinaan baik dukungan kegiatan, pembinaan/pengawalan/pendampingan, regulasi dan pendanaan di daerah perlu didukung oleh Pemerintah Daerah setempat melalui SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap komoditas spesifik dan potensial di wilayah masing-masing terhadap pengembangan 9 (sembilan) komoditas unggulan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar yaitu Kelapa, Kelapa, Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kakao, Teh, Sagu dan Jambu Mete.

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar dalam rangka melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2020 dengan program utama yaitu program

"Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar Berkelanjutan" mendapat alokasi dana dari APBN sebesar Rp. 55.954.418.000.- dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar di pusat dan di daerah yang meliputi: (1). Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan produksi sagu; (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan produksi jambu mete; (3) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan produksi kakao; (4) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan produksi karet untuk komoditas ekspor; (5) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan produksi kelapa; (6) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan produksi kopi; (7) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas tanaman tahunan dan penyegar produksi CPO; (8) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan produksi teh untuk komoditas ekspor; (9) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan produksi gula aren.

C. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Arah kebijakan umum ditetapkan dalam rangka mendukung program Direktorat Perbenihan Perkebunan Tahun 2020-2024 yaitu peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan, arah kebijakan umum Pembangunan Perkebunan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan
   a) Kebijakan penyediaan benih unggul bermutu tanaman perkebunan, untuk mendukung pembangunan perkebunan berupa: pembangunan kebun induk (KI), pembangunan kebun entres, pemeliharaan kebun induk (KI), pemeliharaan kebun entres dan pemeliharaan kebun benih datar (KBD).
   b) Kebijakan penerapan budidaya yang baik (GAP).
   c) Kebijakan pemeliharaan kebun sumber benih (BPT, PIT dan kebun entres) yang telah ditetapkan.
   d) Kebijakan pemeliharaan kebun sumber benih unggul yang telah ditetapkan.
   e) Kebijakan penetapan kebun sumber benih tanaman perkebunan (BPT, PIT dan kebun entres).
   f) Kebijakan penetapan kebun sumber benih varietas yang telah dilepas.
   g) Evaluasi kelayakan kebun sumber benih tanaman perkebunan yang telah ditetapkan.

2. Fasilitas Teknis Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan

Sasaran program dan kegiatan pembangunan perkebunan Tahun 2020 yang ditetapkan dan didukung oleh anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK dan selanjutnya menjadi Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan dengan Direktur Jenderal Perkebunan Tahun 2020, untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan utama dengan total anggaran sebesar Rp.407.105.687.000 dengan rincian sebagai berikut:

a. Tersedianya benih tanaman substitusi impor, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
   - Jumlah benih tebu yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.167.173.000
   - Jumlah benih tembakau yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.000.000
   - Jumlah benih sagu yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.510.000.000

b. Tersedianya benih tanaman ekspor, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
   - Jumlah benih kopi yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.420.698.000
   - Jumlah benih karet yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.237.641.000
   - Jumlah benih lada yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.870.143.000
   - Jumlah benih pala yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.071.260.000
   - Jumlah benih nilam yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.805.000.000
   - Jumlah benih sereh wangi yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.581.250.000
   - Jumlah benih jambu mete yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.156.523.000
   - Jumlah benih kakao yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.845.128.000
   - Jumlah benih kelapa yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.135.354.000
   - Jumlah benih teh yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.700.000.000
   - Jumlah benih cengkeh yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.352.530.000

- Jumlah benih vanili yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.423.900.000

3. Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Perbenihan Perkebunan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik perbenihan perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.048.135.000.

D. Penguatan Perlindungan Perkebunan

Sasaran kegiatan dukungan perlindungan perkebunan antara lain:

1. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan.

E. Produksi, Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Modern (Kegiatan di 4 UPT Pusat)

Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan dan tiga tugas tambahan dari eselon 1 yaitu: (1) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar; (2) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan; (3) Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan. Sasaran kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBPPTP) Medan, Surabaya dan Ambon adalah:

1. Meningkatnya pengembangan metode dan teknologi pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan;
2. Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan;
3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan.

Dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Produksi, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
2. Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan;
3. Layanan Internal (Overhead);
4. Layanan Perkantoran;
5. Layanan dukungan manajemen satker.

Sedangkan sasaran kegiatan (BPTP) Pontianak adalah:

1. Meningkatnya pengembangan perakitan teknologi proteksi tanaman perkebunan;
2. Meningkatnya pengembangan teknologi pengendalian hayati dan pestisida nabati;
3. Meningkatnya fasilitasi pengamatan dan pengendalian OPT perkebunan serta gangguan usaha perkebunan;
4. Meningkatnya pelayanan informasi proteksi tanaman perkebunan;
5. Meningkatnya pengembangan jaringan laboratorium;
6. Meningkatnya kemampuan SDM proteksi perkebunan;
7. Meningkatnya pengelolaan kepegawaian, administrasi, keuangan dan perlengkapan.

F. Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Sasaran kegiatan dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan untuk komoditas ekspor dan Tersedianya infrastruktur pertanian perkebunan pascapanen dengan indikator kinerja tahun 2020-2024 (edisi revisi) adalah:

1. Nilai ekspor produk perkebunan
2. Tingkat kemanfaatan sarana perkebunan yang sesuai peruntukan Pembinaan usaha perkebunan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Sub Direktorat Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha.

G. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Sesuai tugas dan fungsi berdasarkan perubahan organisasi Kementerian Pertanian sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/ 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian serta adanya restrukturisasi program K/L melalui penyempurnaan output/outcome yang lebih terukur dalam kerangka arsitektur anggaran berbasis kinerja dan pendekatan konsep Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK) maka Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 menetapkan sasaran kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 merupakan bagian dari program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 yaitu: **"Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan".**

2.2.1 Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020

Sasaran Kegiatan Utama Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 adalah Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan, Penyediaan sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan, Pengendalian Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan, Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien, Pengelolaan anggaran direktorat Jenderal Perebunan yang akuntabel dan berkualitas serta meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan. Sedangkan sasaran kegiatan per *output* kegiatan adalah:

Tabel 4. Sasaran Kegiatan Berdasarkan *Output* Tahun 2020

No	Kode/Kegiatan	Pagu (Rp)
1.	1777 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	55.954.418.000,00
2.	1779 | Dukungan Perlindungan Perkebunan	24.850.602.000,00
3.	1780 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	218.266.234.000,00
4.	1781 | Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	91.110.352.000,00
5.	5888 | Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	113.036.887.000,00
6.	5890 | Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	407.105.687.000,00
7.	5889 | Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	89.733.691.000
	TOTAL	**1.000.057.871.000,00**

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020

Program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan Tahun 2019 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp.1.000.057.871.000,00,-.. Kegiatan Utama Ditjen Pekebunan dan dukungan anggaran Tahun 2020 tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. **Kegiatan pengembangan tanaman tahunan dan penyegar** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.954.418.000,00,-. Dengan output kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5. Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2020

NO	KODE / NAMA KEGIATAN / OUPUT	PAGU
	1777 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	**55.954.418.000,00**
a	1777001 | Kawasan Kopi	8.754.617.000,00
b	1777002 | Kawasan Kakao	9.988.486.000,00
c	1777003 | Kawasan Karet	9.077.936.000,00
d	1777004 | Kawasan Kelapa	10.853.774.000,00
e	1777005 |Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Tahunan dan. Penyegar Lainnya)	6.697.532.000,00
f	1777006 | Area Tanaman Sagu	1.346.800.000,00
g	1777007 |Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Tanaman Tahunan dan Penyegar	3.618.107.000,00
h	1777008 | Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Tahunan dan Penyegar	5.617.166.000,00

Sumber : Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, 2020

Adapaun target kegiatan tahun 2020 sesuai dengan *output* ialah :

a. Pengembangan tanaman kopi seluas 7.970 ha;
b. Pengembangan tanaman kakao seluas 4.990 ha;
c. Pengembangan tanaman karet seluas 4.107 ha;
d. Pengembangan tanaman kelapa seluas 12.191 ha;
e. Area Tanaman Sagu 400 seluas ha
f. Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya) 2.260 ha;
g. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Tanaman Tahunan dan Penyegar sebanyak bimtek 16 lokasi;
h. Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Tahunan dan Penyegar sebanyak 7 pedoman umum

2. **Kegiatan dukungan perlindungan perkebunan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.850.602.000,00,-. Dengan output kegiatan sebagai berikut:

Tabel 6. Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2020

NO	KODE / NAMA KEGIATAN / OUPUT	PAGU
	1779 | Dukungan Perlindungan Perkebunan	**24.850.602.000,00**
a	1779001 | Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	2.310.805.000,00
b	1779002 | Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	6.517.621.000,00
c	1779003 | Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	5.061.190.000,00
d	1779004 | Perangkat Perlindungan Perkebunan	7.938.915.000,00
e	1779006 | Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan.	15.593.000,00
f	1779008 | Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	3.006.478.000,00

Sumber : Direktorat Perlindungan Perkebunan, 2020

Adapaun target kegiatan tahun 2020 sesuai dengan *output* ialah :

a. Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan seluas 27.000 Ha;
b. Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun seluas 1.065 Ha;
c. Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan sebanyak 35 desa;
d. Perangkat Perlindungan Perkebunan sebanyak 53 unit;
e. Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan sebayak 3 kasus;
f. Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan sebanyak 1 layanan.

3. **Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 218.266.234.000,00,-. Dengan *output* kegiatan sebagai berikut:

Tabel 7. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020

NO	KODE / NAMA KEGIATAN / OUPUT	PAGU
	1780 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	**218.266.234.000,00**
a	1780950 | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	67.504.925.000,00
b	1780951 | Layanan Sarana dan Prasaranaa Internal	15.832.198.000,00
c	1780970 | Layanan Dukungan Manajemen Satker	88.801.508.000,00
d	1780994 | Layanan Perkantoran	46.127.603.000,00

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020

Adapun target kegiatan tahun 2020 sesuai dengan *output* ialah :
a. Layanan dukungan manajemen eselon I selama 12 bulan sebanyak 1 layanan;
b. Layanan Sarana dan Prasaranaa Internalselama 12 bulan sebanyak 1 layanan;
c. Layanan Dukungan Manajemen Satker selama 12 bulan sebanyak 1 layanan;
d. Layanan Perkantoran selama 12 bulan sebanyak 1 layanan.

4. **Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.110.352.000,00,-. Dengan *output* kegiatan sebagai berikut:

Tabel 8. Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2020

NO	KODE / NAMA KEGIATAN / OUPUT	PAGU
	1781 | Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	**91.110.352.000,00**
a	1781001 | Penyediaan, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	2.547.530.000,00
b	**1781002** | Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan	4.040.313.000,00
c	1781951 | Layanan Sarana dan Prasaranaa Internal	17.694.809.000,00
d	1781970 | Layanan Dukungan Manajemen Satker	12.713.987.000,00
e	1781994 | Layanan Perkantoran	54.113.713.000,00

Sumber : Direktorat Perbenihan, 2020

Adapun target kegiatan tahun 2020 sesuai dengan output ialah :

a. Pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan sebanyak 88.734.620 batang;
b. Pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan sebanyak 19 teknologi;
c. Fasilitasi teknis dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan selama 12 bulan;
d. Layanan dukungan manajemen sebanyak 4 layanan;
e. Layanan sarana dan prasaranaa internal 4 layanan;
f. Layanan perkantoran sebanyak 4 layanan.

5. **Kegiatan pengembangan tanaman semusim dan rempah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.036.887.000,00,-. Dengan output kegiatan sebagai berikut:

Tabel 9. Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2020

NO	KODE / NAMA KEGIATAN / OUPUT	PAGU
	5888 | Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	**113.036.887.000,00**
a	5888001 | Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh	21.439.713.000,00
b	5888002 | Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	81.374.092.000,00
c	5888003 | Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya)	6.115.582.000,00
d	5888004 | Bimtek Monitoring dan Evaluasi Tanaman Semusim dan Rempah	17.000.000,00
e	5888005 | Peraturan/Norma/Pedoman Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	4.090.500.000,00

Sumber : Direktorat Perbenihan, 2020

Dengan target *output* kegiatan sebagai berikut:

a. Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh seluas 22919 ha;
b. Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) seluas 3.181,00 ha;
c. Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya) seluas 1.168,00 ha;

d. Bimtek Monitoring dan Evaluasi Tanaman Semusim dan Rempah sebanyak 75 lokasi;
e. Peraturan/Norma/Pedoman Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah selama 1 tahun sebanyak 1 kegiatan.

6. **Kegiatan dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.733.691.000,00,- dengan *output* kegiatan sebagai berikut:

Tabel 10. Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2020

NO	KODE / NAMA KEGIATAN / OUPUT	PAGU
	5889 | Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	**89.733.691.000,00**
a	5889001 | Sarana dan Prasaranaa Pasca panen tanaman perkebunan	40.164.017.000,00
b	5889002 | Sarana dan Prasaranaa Pengolahan Hasil Perkebunan	34.007.479.000,00
c	5889003 | Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	2.587.105.000,00
d	5889004 | Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan	1.016.580.000,00
e	5889005 | Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	3.385.937.000,00
f	5889006 | Pemasaran Hasil Perkebunan	440.015.000,00
g	5889007 | Peraturan/Norma/Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	8.132.558.000,00

Sumber : Direktorat Perbenihan, 2020

Dengan target *output* kegiatan sebagai berikut:

a. Sarana dan Prasaranaa Pasca panen tanaman perkebunan sebanyak 146 KT;
b. Sarana dan Prasaranaa Pengolahan Hasil Perkebunan sebanyak 128 unit ;
c. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan di 54 lokasi
d. Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan di 6 Provinsi sebayak 66 surat registrasi;
e. Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat sebanyak 3.900 pekebun;
f. Pemasaran Hasil Perkebunan sebanyak 35 MoU;
g. Peraturan/Norma/Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebanyak 6 pedoman.

7. **Kegiatan Dukungan Perbebenihan Tanaman Perkebunan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 407.105.687.000,00,- dengan *output* kegiatan sebagai berikut:

Tabel 11. Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan Tahun 2020

NO	KODE / NAMA KEGIATAN / OUPUT	PAGU
	5890 | Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	**407.105.687.000,00**
1	5890001 | Nursery	21.436.332.000,00
2	5890002 | Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan	88.093.019.000,00
3	5890003 | Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	2.607.559.000,00
4	5890004 | Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Perbenihan Perkebunan	1.942.068.000,00
5	5890005 | Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan	7.125.736.000,00
6	5890006 |	285.900.973.000,00

Sumber : Direktorat Perbenihan, 2020

Dengan target *output* kegiatan sebagai berikut:

a. Nursery sebanyak 29 unit;
b. Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan sebanyak 3.373,00;
c. Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan sebanyak 143 rekomendasi;
d. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Perbenihan Perkebunan sebanyak 64 lokasi;
e. Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan sebanyak 5 kegiatan.

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya alam yang tersedia melalui target sasaran kinerja serta indikator kinerja kegiatan yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil (*outcome*) maupun keluaran (*output*).

Perjanjian Kinerja (PK) awal Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 ditandatangani pada Bulan Desember 2019 kemudian mengalami 3 kali perubahan yakni pada Bulan April, Juni dan Desember 2020. Perjanjian Kinerja (PK) sebagai penjabaran dari Rencana strategis Direktorat Jenderal Perkebunan setiap tahunnya dan telah mengikuti Pedoman Permen-PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai dukungan terhadap pencapaian kinerja pada PK, pada Tahun 2020 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana yang tertuang dalam DIPA/POK yang dikeluarkan pada bulan Desember 2019 dengan total anggaran sebesar Rp.1.525.816.437.000,-.

Selanjutnya pada bulan April 2020 melalui refokusing anggaran menjadi Rp. 812.670.698.000,-. Perubahan anggaran terjadi kembali pada Bulan Juni 2020 dengan alokasi Rp. 862.670.698.000 dan pada Bulan Desember kembali terjadi perubahan anggaran menjadi Rp. 1.000.057.871.000.

Tabel 12. Perkembangan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020

TAHUN 2020			Desember 2019		Apr-20		Juni 020		Desember 2020				
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	NO	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET	SATUAN
	JUMLAH ANGGARAN (RP)		1.525.816.437.000,00		812.670.698.000,00		862.670.698.000,00					1.000.057.871.000,00	
1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian Perkebunan	Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Perkebunan	3,82	%	3,82	Nilai	3,82	Nilai	1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian Perkebunan	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Perkebunan	1,80	%
		Rasio Pemenuhan kebutuhan untuk industri dalam negeri	40,00	%	92,00	Nilai	92,00	Nilai	2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Perkebunan yang Sesuai Kebutuhan	Tingkat Kemanfaatan sarana Perkebunan	80,00	%
2	Tersedanya infrastruktur pertanian perkebunan pascapanen	Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarka kebutuhan pascapanen perkebunan	100,00	%	100,00	%	100,00	%	3	Pengendalian Penyerangan OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	Rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan	80,00	%
3	Terkendalinya penyebaran OPT dan tertanggulanginya DPI pada Tanaman Perkebunan	Rasio luas serangan OPT terkendali dan area terkena DPI tertanggulangi terhadap luas lahan terserang OPT dan berpotensi terkena DPI	1,00	%	1,00	%	1,00	%			Rasio luas areal perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40,00	%
		Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan Penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	84,00	Nilai	84,00	Nilai	84,00	Nilai	4	Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	Nilai PMRB Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00	Nilai
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahu 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga	92,00	Nilai	92,00	Nilai	92,00	Nilai	5	Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00	Nilai
5	Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan	3,00	Nilai IKM	3,00	Nilai IKM	3,00	Nilai IKM	6	Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan	3,00	Nilai IKM
6	Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Direktorat Jenderal	Nilai Pemeringkatan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkebunan	75,00	Nilai	75,00	%	75,00	%					

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020

Anggaran tersebut diterima oleh 92 satker lingkup Ditjen Perkebunan terdiri 1 (satu) satker Pusat Ditjen Perkebunan, 4 Satker UPT Pusat Ditjen Perkebunan, 76 Satker (DK dan TP) Provinsi yang menangani perkebunan dan 11 Satker Kabupaten yang menangani perkebunan di seluruh Indonesia.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 dari PK awal hingga perubahan ke-3 pada Bulan Juni 2020 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Program tidak mengalami perubahan. Sedangkan pada Bulan Desember 2020 terjadi perubahan signifikan pada PK sebagaimana pada tabel di atas baik pada sasaran, indikator kinerja sasaran dan target. Perubahan signifikan terjadi pada:

1. Sasaran-1 yang semula Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian Perkebunan diukur dengan indikator Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Perkebunan dan Rasio Pemenuhan kebutuhan untuk industri dalam negeri, indikator pengukuran sasaran **berubah** menjadi **Pertumbuhan Nilai Ekspor** untuk Produk Perkebunan. Perubahan ini didasari atas alasan bahwa ekspor produk perkebunan diharapkan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Satuan Produk Domestik Bruto ialah dalam satuan nilai dolar sehingga akan lebih sesuai ketika indikator peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan menggunakan nilai.
2. Sasaran-2 yang semula Tersedianya infrastruktur pertanian perkebunan pascapanen dengan indikator capaian kinerja Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan pascapanen perkebunan, terjadi perubahan indikator menjadi **Tingkat Kemanfaatan Sarana Perkebunan;**
3. Sasaran-3 Terkendalinya penyebaran OPT dan tertanggulanginya DPI pada Tanaman Perkebunan dengan indikator Rasio luas serangan OPT terkendali dan

area terkena DPI tertanggulangi terhadap luas lahan terserang OPT dan berpotensi terkena DPI berubah menjadi Pengendalian Penyerangan OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan dengan 2 indikator yakni Rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan dan Rasio luas areal perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI;

Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegitan (IKSP) serta target yang telah disusun dalam **Format Perjanjian Kinerja (PK)** Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut, sedangkan PK, SP dan IKSP dapat dilihat di lampiran 3.

PK Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 yang terakhir (Desember 2020) ditentukan oleh PK Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Sementara itu PK Direktorat lainnya antara lain Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, serta Direktorat Perbenihan ialah mendukung Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan melalui peningkatan produksi komoditi perkebunan berorientais ekspor yang terdiri dari karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, teh, lada, tembakau, kakao, cengkeh, pala, kayu manis, kacang mede, sagu, gambir. Secara lengkap PK Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 (Revisi Desember 2020) tertera pada tabel 13 berikut:

Tabel 13. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 (Desember 2020)

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Tambah Dan Daya Saing Komoditas Perkebunan	1-1	Pertumbuhan Nilai ekspor perkebunan	1.8 %
2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Perkebunan yang Sesuai Kebutuhan	2-1	Tingkat kemanfaatan sarana perkebunan	80 %
3	Pengendalian Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	3-1	Rasio serangan OPT Perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan	80 %
		3-2	Rasio luas area Perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40 %
4	Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	4-1	Nilai PMRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32.58 Nilai
5	Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	5-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85.00 Nilai
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan	6-1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan	3.00 Nilai IKM (skala likert)

Sumber : Ditjen Perkebunan, 2020

Berdasarkan pada Tabel 13 diatas dapat diuraikan bahwa:

1) Target Meningkatnya nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan dengan indikator kinerja pertumbuhan nilai ekspor perkebunan sebesar 1,8%;
2) Target Penyediaan prasarana dan sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan dengan indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana perkebunan sebesar 80%;
3) Target pengendalian Penyerangan OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan dengan indikator kinerja Rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan sebesar 80%, Rasio luas area perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI sebesar 40%;
4) Target Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efekif dan Efisien dengan indikator kinerja nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 32,58;
5) Target Pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akutabel dan Berkualitas dengan Indikator capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 85;
6) Target Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan dengan indikator capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 3,0 skala likert.

Dalam upaya keseragaman, konsistensi dan ketepatan serta akurasi dalam pengukuran capaian kinerja sasaran program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) digunakan petunjuk *cascading* dan manual IKSP sebegaimana pada lampiran 3.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi disajikan sebagai pertanggungjawaban pimpinan atas nama organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan analisis yang realistis dan formal sesuai aturan yang berlaku.

Program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 dilaksanakan tentu saja dalam rangka mendukung program Kementerian Pertanian yang tercantum pada Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian yang terdiri dari:

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri
2. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional
3. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional
4. Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian
5. Tersedianya Prasaranaa dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan
6. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
8. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima
9. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Dari 9 program Kementerian Pertanian Tahun 2020, Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan kontribusi pada pencapaian program Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional, Tersedianya Prasaranaa dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan, Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan, Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima dan Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Dalam mendukung program Kementerian Pertanian yang tercantum pada PK Tahun 2020, maka program Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan program sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya

organisasi yang akuntabel. Setiap akhir tahun anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam permen-PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Capaian Kinerja Ditjen Perkebunan Tahun 2010 sesuai perjanjian kinerja antara Dirjen Perkebunan dengan Menteri Pertanian dapat dilihat pada tabel 14 berikut:

Tabel 14. Capaian Kinerja Ditjen Perkebunan Tahun 2020 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Sasaran Meningkatnya nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan	1-1	Kinerja pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	1,8%	12,91%	717,2%
2	Penyediaan prasarana dan sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan	2-1	Tingkat kemanfaatan sarana perkebunan	80%	92,59%	116,05%
3	Pengendalian Penyerangan OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	3-1	Rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan	80%	35,57%	44,46%
		3-2	Rasio luas areal perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40%	39,44%	98,61%
4	Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efekif dan Efisien	4-1	Nilai PMRB Direktorat Jenderal Perirkebunan	32,58%	32,58%	100%
5	Pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akutabel dan Berkualitas	5-1	Indikator capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85%	73,09%	85,98%
6	Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan	6-1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar	3 (Skala Likert)	3,51 (Skala Likert)	117%

Sumber: Ditjen Perkebunan 2020

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Ditjen Perkebunan tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan dengan indikator Kinerja pertumbuhan nilai ekspor terealisasi sebesar 12,91% dari target 1,8% (717,2%) dan masuk kategori sangat berhasil;
2. Sasaran Penyediaan prasarana dan sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan Berdasarkan indikator sasaran kinerja terealisasi sebesar 92,59% dari target 80% (116,05%) dan masuk dalam kategori sangat berhasil;
3. Sasaran Pengendalian Penyerangan OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan diukur dengan dua indikator. Indikator pertama rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan terealisasi sebesar 35,57% dari target 80% (44,46%). Indikator kedua rasio luas areal perkebunan yang ditangani

dibandingkan dengan area terkena DPI terealisasi sebesar 39,44% dari target 40% (98,61%);

4. Sasaran Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efekif dan Efisien dengan indikator Nilai PMRB Direktorat Jenderal Perkebunan terealisasi sebesar 32,58 dari target 32,58 (100%);
5. Sasaran Pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Kinerja/NK terealisasi sebesar 73,09% dari target 85% (85,98%) dan termasuk dalam kategori berhasil;
6. Sasaran kinerja meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan terealisasi sebesar 3,51 dari target 3 skala likert (117%).

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sesuai yang diamanahkan dalam Permen PAN&RB Tahun 2014, Laporan Kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Instansi Pemerintah diwajibkan mengevaluasi dan menganalisis kinerja berdasarkan aspek sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini yang tercantum pada Perjanjian Kinerja (PK);
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
e. Analisis penyebab capaian/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran);
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Untuk mengukur setiap indikator kinerja sasaran program (IKSP) dalam perjanjian kinerja (PK) berpedoman pada manual IKU yang ditetapkan pada saat penyusunan IKSP lingkup Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk mengukur efisiensi (E) digunakan formula berdasarkan PMK 214 Tahun 2017, sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(1 - \frac{RAK \text{ ke i}/RVK \text{ ke i}}{PAK \text{ ke i}/TVK \text{ ke i}}\right) \times 100\%}{n}$$

Sedangkan untuk mengukur nilai efisiensi (NE) digunakan formula berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Dari formula tersebut berarti suatu kegiatan dikatakan efisien jika memiliki nilai efisiensi lebih besar sama dengan 50% dan jika lebih besar dari 100% dikatakan efisien tetapi perlu penjelasan lebih lanjut karena dianggap anomali.

3.2.1. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan

Untuk mencapai target indicator sasaran meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan sebesar 1,8% seluruh kegiatan, diarahkan pada:

a. Meningkatkan jumlah produk ekspor hasil perkebunan bernilai tambah yang diolah;
b. Meningkatkan jumlah produk ekspor hasil perkebunan bernilai tambah yang melalui proses pasca panen;
c. Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang menghasilkan produk komoditas ekspor perkebunan sesuai standar dan/atau regulasi yang ditetapkan;
d. Meningkatkan jumlah produk ekspor hasil perkebunan yang dimanfaatkan.

Indikator sasaran meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan ialah pertumbuhan nilai ekspor untuk produk perkebunan. Acuan pertumbuhan nilai ekspor tahun 2020 sebesar 1,8%. Capaian IKSP dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Ekspor Produk Perkebunan (t)} - \text{Nilai Ekspor Produk Perkebunan (t-1)}}{\text{Nilai Ekspor Produk Perkebunan (t-1)}} \times 100\%$$

Target dan realisasi indikator kinerja pertumbuhan nilai ekspor tahun 2020 beserta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Target dan Capaian Sasaran Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Tahun 2020

NO	IKSK	SATUAN	CAPAIAN SASARAN KINERJA 2020			
			TARGET	REALISASI	%	TK KEBERHASILAN
1.	Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Perkebunan	%	1,8	12,91	717,20	Sangat berhasil

Sumber : BPS, 2020 diolah Direktorat PPHBUN

Sasaran Meningkatnya nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan dengan indikator Kinerja pertumbuhan nilai ekspor terealisasi sebesar 12,91% dari

target 1,8%. Realisasi ini mencapai 717,2% dari target dan masuk kategori sangat berhasil. Realisasi nilai pertumbuhan nilai ekspor sebesar 12,91% ini dihitung berdasarkan realisasi nilai ekspor tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Secara lebih rinci volume dan nilai ekspor komoditi perkebunan disajikan pada tabel 16 berikut:

Tabel 16. Realisasi Volume dan Nilai Ekspor Tahun 2020 per Komoditi Prioritas

KOMODITAS	2020 Volume (Ton)	Nilai (US$)
Kelapa	2.105.260,55	1.172.236.730,93
Karet	2.455.691,49	3.246.746.335,56
Kelapa Sawit	35.659.259,46	19.711.849.248,43
Kopi	379.353,81	821.937.392,55
T e h	45.264,86	96.325.235,59
Lada	58.378,40	160.387.766,20
Tembakau	31.131,96	196.007.343,33
Kakao	559.825,09	1.244.209.035,52
Cengkeh	47.765,45	176.541.059,69
Panili	363,05	60.247.736,55
Pala	22.835,63	158.519.131,47
Kayu Manis	37.027,42	151.294.719,85
Kacang Mede	85.580,45	149.743.324,85
Sagu	13.174,81	2.860.897,95
Gambir	18.060,53	36.633.767,39
Hasil Perkebunan Lainnya	212.649,46	192.054.394,56
Total	**41.731.622,44**	**27.577.594.120,42**

Sumber : BPS diolah PPHBUN, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai ekspor komoditas perkebunan tahun 2020 sebesar 27,7 Milyar USD dengan nilai tertinggi pada komoditi kelapa sawit, disusul karet, kakao dan kelapa dalam. Total volume ekspor tahun 2020 sebesar 41.731.622,44 ton dengan kontribusi terbesar diberikan oleh komoditi kelapa sawit, karet dan kelapa dalam.

A. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019)

Realisasi kinerja volume dan nilai ekspor tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 tertera pada tabel 17 berikut:

Tabel 17. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perkebunan Tahun 2019-2020

KOMODITAS	2019		2020		GROWTH	
	Volume (Ton)	Nilai (US$)	Volume (Ton)	Nilai (US$)	Volume	Nilai
Kelapa	1.878.871,92	890.823.637,90	2.105.260,55	1.172.236.730,93	12,05%	31,59%
Karet	2.582.684,20	3.654.531.126,19	2.455.691,49	3.246.746.335,56	-4,92%	-11,16%
Kelapa Sawit	35.593.499,71	16.588.715.102,48	35.659.259,46	19.711.849.248,43	0,18%	18,83%
Kopi	359.053,17	883.123.374,59	379.353,81	821.937.392,55	5,65%	-6,93%
Teh	43.112,77	93.263.501,71	45.264,86	96.325.235,59	4,99%	3,28%
Lada	51.771,12	147.342.619,65	58.378,40	160.387.766,20	12,76%	8,85%
Tembakau	33.265,73	201.972.524,94	31.131,96	196.007.343,33	-6,41%	-2,95%
Kakao	341.518,14	1.143.593.999,30	559.825,09	1.244.209.035,52	63,92%	8,80%
Cengkeh	25.990,24	111.537.121,17	47.765,45	176.541.059,69	83,78%	58,28%
Panili	260,81	69.609.679,90	363,05	60.247.736,55	39,20%	-13,45%
Pala	19.957,25	138.024.160,23	22.835,63	158.519.131,47	14,42%	14,85%
Kayu Manis	36.765,35	133.734.156,00	37.027,42	151.294.719,85	0,71%	13,13%
Kacang Mede	90.558,70	182.674.921,85	85.580,45	149.743.324,85	-5,50%	-18,03%
Sagu	13.892,56	3.276.989,67	13.174,81	2.860.897,95	-5,17%	-12,70%
Gambir	18.608,07	44.342.038,35	18.060,53	36.633.767,39	-2,94%	-17,38%
Hasil Perkebunan Lainnya	170.143,96	138.398.091,90	212.649,46	192.054.394,56	24,98%	38,77%
Total	**41.259.963,69**	**24.424.963.045,83**	**41.731.622,44**	**27.577.594.120,42**	**1,14%**	**12,91**

Sumber : BPS diolah PPHBUN, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan volume ekspor produk perkebunan tahun 2020 meningkat sebesar 1,14% dibandingkan tahun 2019. Nilai ekspor produk perkebunan meningkat sebesar 12,91% dibandingkan tahun 2019.

B. Realisasi serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya

Realisasi serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya tertera pada tabel 18 berikut:

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Nilai Ekspor Komoditi Perkebunan 2016-2020

IKSK	SATUAN	REALISASI NILAI EKSPOR					2020 DIBANDING 2019	2020 DIBANDING 2018	2020 DIBANDING 2017	2020 DIBANDING 2016
		2020	2019	2018	2017	2016	%	%	%	%
Nilai Ekspor untuk Produk Perkebunan	Milyar USD	27,7	24,90	24,85	26,36	22,32	11,24	11,46	-2,32	24,10

Sumber : BPS, 2020 diolah PPHBUN

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi nilai ekspor tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 11,24%, jika dibandingkan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 11,46%, dibandingkan dengan 2017 mengalami penurunan sebesar 2,32% dan dibandingkan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 24,10%.

C. Analisis penyebab capaian/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja dinyatakan bahwa realisasi nilai ekspor komoditas perkebunan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 11,24% dibandingkan tahun 2019 dan masuk dalam kategori sangat berhasil.

Capaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Lobi perdagangan dengan negara mitra baru, termasuk untuk mengupayakan *direct export* terhadap komoditas yang selama ini di reekspor melalui Tiongkok;
2. Lobi terhadap kesepakatan tarif bea masuk di negara tujuan dan memberikan kemudahan perdagangan bilateral, seperti untuk sugar, vanaspati ghee dan komoditas lainnya;
3. Meningkatkan jaminan atas kualitas, *brand image*, dan ketersediaan produk secara kontinyu;
4. Meningkatkan kerja sama perdagangan untuk peningkatan akses pasar melalui optimalisasi pemanfaatan perwakilan Indonesia di luar negeri, kerja sama yang sudah berjalan dipercepat, dan tentunya dengan melakukan pengembangan kesepakatan baru;
5. Meningkatkan konsumsi domestik. Seperti program B-30 untuk CPO, aspal karet untuk karet, kopi, gula semut dan lainnya;
6. Mengoptimalkan pelayanan jaringan informasi dan komunikasi secara terorganisasi antara *bussiness to bussiness* (B to B);
7. Peran pemerintah dalam hal diplomasi dan fasilitasi promosi produk perkebunan unggulan, sehingga meningkatkan akses pasar produk tersebut;
8. Meningkatkan kesadaran akan peningkatan kualitas dan jaminan mutu yang sesuai dengan standar negara mitra tujuan ekspor;
9. Adanya peningkatan akses pasar produk perkebunan Indonesia di negara mitra tujuan ekspor dibandingkan dengan negara-negara lain;
10. Adanya peningkatan ekspor produk perkebunan Indonesia di negara mitra tujuan ekspor.

Sedangkan permasalahan yang menyebabkan terhambatannya ekspor produk perkebunan tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi permintaan produk turun akibat pemberlakuan PSBB/*lockdown* di sejumlah negara dan penutupan sejumlah pelabuhan ekspor sehingga tidak bisa *shipping;*
2. Harga komoditas berfluktuasi akibat kendala pada distribusi dan logistik (khususnya kendala mahalnya kontainer dan *shipping*);

3. Produksi komoditas perkebunan cenderung menurun disebabkan para petani lebih mengalokasikan keuangan pada kebutuhan pangan dahulu dibanding meremajakan atau pemeliharaan kebun;
4. Adanya hambatan tarif dan non tarif di negara tujuan ekspor untuk melindungi pasar dalam negeri masing-masing negara;
5. Fokus kebijakan beberapa negara tujuan ekspor adalah memperbaiki ekonomi dalam negeri dengan subsidi dan stimulus ekonomi shg kebutuhan ekspor belum terlalu signifikan;
6. *Overstock* komoditas perkebunan Indonesia karena tidak mampu menyerap produk di dalam negeri dan terhambatnya ekspor (contoh kasus pada komoditas kopi karena industri cafe, restoran dan *food beverages* lainnya tutup);
7. Penurunan kualitas produk karena tidak adanya alokasi sejumlah eksportir untuk meningkatkan *quality control* pada produk ekspor mereka;
8. Hambatan regulasi ekspor di Indonesia dan persyaratan-persyaratannya masih banyak dikeluhkan oleh eksportir;
9. Produktivitas menurun seperti profitas tanaman dan SDM.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, rekomendasi solusi yang dapat dilakukan dapat antara lain:

1. Perbaikan penanganan pasca panen komoditas perkebunan;
2. Koordinasi pengendalian harga komoditas;
3. Pengawalan komoditas dalam menghadapi gejolak ekonomi dunia;
4. Fasilitasi penjaminan pasokan bahan baku untuk industri dalam negeri masih belum optimal.

3.2.2 Sasaran Tingkat Kemanfaatan Sarana Perkebunan

Capaian sasaran tingkat kemanfaatan sarana perkebunan dapat dilihat pada tabel 19 berikut:

Tabel 19. Tingkat Kemanfaatan Sarana Perkebunan Tahun 2020

SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penyediaan prasarana dan sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan	2-1	Tingkat kemanfaatan sarana perkebunan	80%	89,47%	111,83%

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020

Sasaran Penyediaan prasarana dan sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan Berdasarkan indikator sasaran kinerja 89,47% dari target 80% (111,84%) dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Dalam pengukuran indikator tingkat kemanfaatan sarana perkebunan ini dilakukan dengan metode sampling terhadap kelompok tani penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan perkebunan tahun 2020

sebanyak 10% dari jumlah kelompok tani penerima bantuan sarana prasaranaa perkebunan. Tahun 2020 jumlah petani penerima bantuan sarana pascapanen sebanyak 272 kelompok tani yang terdiri dari 2 kelompok yakni kelompok tani penerima bantuan sarana prasaranaa pascapanen sebanyak 146 KT dan penerima bantuan sarana prasaranaa pengolahan sebanyak 126 KT. Jumlah sampel 10% dari jumlah populasi sebanyak 27 kelompok tani. Secara detail tingkat kemanfaatan alsintan dapat dilihat pada tabel 20 berikut:

Tabel 20. Uraian Tingkat Kemanfaatan Sarana Perkebunan Tahun 2020

NO	URAIAN IKSP	Jumlah Sarana yang tersedia (Unit)		SAMPEL (2019)			Tingkat Kemanfaatan 2020 (%)			KETERANGAN
		2019	2020	PROVINSI	KT/Sarana	Memanfaatkan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen	106	146	8	8	8	80,00	100,00	125,00	8 sarana dimanfaatkan dari 8 sarana pasca panen yang diberikan
2	Tingkat kemanfaatan sarana pengolahan	136	126	15	19	17	80,00	89,47	111,84	17 sarana dimanfaatkan dari 19 sarana pengolahan yg diberikan
	JUMLAH/ RATA-RATA	242	272	23	27	25	80	92,59	116,05	

Sumber : PPHBUN 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi tingkat kemanfaatan sarana perkebunan sebesar 92,59% atau mencapai 116,05% dari target 80% atau masuk dalam kategori sangat berhasil, dari total sampel 27 kelompok tani/sarana yang tersebar di 23 provinsi. Capaian kinerja tersebut terbagi atas 2 kinerja sarana perkebunan sebagai berikut:

1. Kemanfaatan sarana pasca panen perkebunan mencapai 125% dari target 80% atau masuk dalam kategori sangat berhasil dengan sampel 8 Unit sarana pasca panen perkebunan yang tersebar di 8 provinsi;
2. Kemanfaatan sarana pengolahan perkebunan mencapai 111,84% dari target 80% atau masuk dalam kategori sangat berhasil dengan sampel 19 Unit sarana pengolahan perkebunan yang tersebar di 15 provinsi.

A. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi tingkat kemanfaatan sarana perkebunan pada tahun 2020 dibanding tahun lalu dan beberapa tahun terakhir belum dapat diukur karena belum ada nilai tingkat kemanfaatan sarana perkebunan pada tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

B. Analisis penyebab capaian/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja dinyatakan bahwa tingkat kemanfaatan sarana perkebunan tahun 2020 masuk dalam kategori sangat

berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas sarana perkebunan yang diberikan kepada kelompok sasaran dimanfaatkan secara optimal dan tetap. Keberhasilan kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1) Bantuan alat dan mesin pertanian (alsin) pascapanen dan pengolahan yang diberikan sesuai dengan permintaan dan pengajuan proposal dari provinsi/kabupaten;
2) Bantuan alat dan mesin pertanian (alsin) pascapanen dan pengolahan diberikan berdasarkan kawasan komoditas;
3) Penerima bantuan alsin pascapanen dan pengolahan merupakan kelompok tani sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan SK CP/CL yang telah ditandatangani oleh kepala dinas provinsi/kabupaten setempat;
4) Adanya koordinasi yang optimal dan terencana antara satker provinsi dan kabupaten sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan antara lain:

1) Tidak semua alat dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan secara maksimal karena kondisi kelembagaan, sosial dan ekonomi kelompok tani masih belum solid.
2) Kelompok tani belum menerapkan pengelolaan sarana perkebunan secara tertib dan akuntabel;
3) Sarana perkebunan pada tahun berjalan sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal karena alat dan mesin pertanian diterima setelah panen raya;
4) Proses pengadaan alsin di beberapa satker terlambat karena beberapa hal seperti kondisi pandemi covid 19, revisi POK, proses tender yang berulang, pergantian pejabat PPK dan KPA, kurangnya SDM teknis, adanya kebijakan pemerintah daerah yang mewajibkan pelaksanaan barang/jasa disentralisasi di kantor Pemda TK I/II, dan pergantian pejabat di daerah.

C. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran) dan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian ataupun kegagalan;

Sasaran kinerja 1 Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 berupa peningkatan nilai ekspor perkebunan dengan indikator pertumbuhan ekspor perkebunan didukung oleh beberapa kegiatan yang ada pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 21. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Kegiatan Pendukung Dalam Mencapai Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Perkebunan Tahun 2020

No	Kode / Nama Kegiatan / Output	Target			Realisasi Fisik dan Keuangan					Efisiensi	Nilai Efisiensi
		Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp.)	%	Volume	%	Progres		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5889 Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Per	**89.733.691.000**			**86.694.141.220**	**96,61**		**104,52**	**97,46**	**104,52**	**52,61**
1	5889001 Sarana dan Prasarana Pasca panen Tanaman perkebunan	40.164.017.000	146	Unit	39.397.468.377	98,09	146	100,00	98,57	101,95	52,55
2	5889002 Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	34.007.479.000	126	Unit	32.277.796.689	94,91	126	98,44	96,19	103,71	52,59
3	5889003 Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	2.587.105.000	54	Lokasi	2.502.035.719	96,71	54	100,00	97,53	103,40	52,59
4	5889004 Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan	1.016.580.000	66	Surat Reg	971.312.475	95,55	66	100,00	96,66	104,66	52,62
5	5889005 Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	3.385.937.000	3.900	Pekebun	3.202.341.800	94,58	3.900	100,00	95,93	105,73	52,64
6	5889006 Pemasaran Hasil Perkebunan	440.015.000	5	MoU	400.727.622	91,07	5	100,00	93,30	109,80	52,75
7	5889007 Peraturan/Norma/Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	8.132.558.000	6	Pedoman	7.942.458.538	97,66	6	100,00	98,25	102,39	52,56

Sumber : Data Dirat PPHBUN, 2020 (diolah).

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya kegiatan pendukung dalam mencapai sasaran kegiatan volume ekspor komoditas perkebunan Tahun 2020 pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan dukungan pengolahan pemasaran hasil perkebunan adalah sebesar 52,61 % (efisien), dengan rincian pencapaian kegiatan sebagai berikut :

1) Sarana dan Parasarana Pasca Panen Tanaman Pekebunan dari pagu anggaran Rp. 40.164.017.000,- terealisasi Rp. 39.397.468.377,- (98,09%) dengan capaian fisik 146 Unit (100,00 %), dengan nilai efisiensi sebesar 52,55% (efisien).
2) Sarana dan Parasarana Pengolahan Hasil Perkebunan dari pagu anggaran Rp. 34.007.479.000,- terealisasi Rp.32.277.796.689,- atau 94,91 dengan capaian fisik 126 Unit (96,19%), dengan nilai efisiensi sebesar 52,59% (efisien).
3) Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dari pagu anggaran Rp. 2.587.105.000,- terealisasi Rp. 2.502.035.719,- (96,71%) dengan capaian fisik 54 Lokasi (100,00%), dengan nilai efisiensi 52,59% (efisien).
4) Standarisasi dan Mutu Hasil Perkebunan dari pagu anggaran Rp. 1.016.580.000,- terealisasi Rp. 971.312.475,- (95,55%) dengan capaian fisik 66 Surat Registrasi (100,00%), dengan nilai efisiensi sebesar 52,62% (efisien).
5) Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat dari pagu anggaran Rp. 3.385.937.000,- terealisasi Rp. 3.202.341.800,- (94,58%) dengan capaian fisik 3.900 Pekebun (100,00%), dengan nilai efisiensi sebesar 52,64% (efisien).

6) Pemasaran Hasil Perkebunan dari pagu anggaran Rp. 440.015.000,- teralisasi Rp. 400.727.622,- (91,07%) dengan capaian fisik 5 MOU (100,00%), dengan nilai efisiensi sebesar 52,75% (efisien).
7) Peraturan/Norma/Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dari pagu anggaran Rp. 8.132.558.000,- teralisasi Rp. 7.942.458.538,- (97,66%) dengan capaian fisik 6 Pedoman (100,00%), dengan nilai efisiensi sebesar 52,56%% (efisien).

3.2.3 Sasaran Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan

Capaian sasaran Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan tertera pada tabel berikut:

Tabel 22. Capaian sasaran Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan

NO	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	3-1	Rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan	80%	44,46%	55,56%
		3-2	Rasio luas areal perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40%	98,61%	246,52%

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020

Sasaran Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan diukur dengan 2 indikator. Indikator pertama rasio luas serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan terealisasi sebesar 44,46% dari target 80% (55,56%). Indikator kedua rasio luas areal perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI terealisasi sebesar 98,61% dari target 40% (246,52%).

Rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan diukur berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\sum = \frac{\text{Total luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan OPT}}{\text{Total Luas Serangan OPT}} \text{x}100\%$$

Evaluasi dan analisis Rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Rasio Serangan OPT Perkebunan yang Ditangani Terhadap Luas Serangan Tahun 2020

IK-4	TERKENDALINYA PENYEBARAN OPT DAN TERTANGGULANGINYA DPI PADA TANAMAN PERKEBUNAN						
	RASIO LUAS SERANGAN OPT TERKENDALI DAN AREA DPI TERTANGGULANGI TERHADAP SERANGAN OPT DAN BERPOTENSI TERKENA DPI					2020 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2019	
TAHUN	LUAS SERANGAN TERKENDALI DAN AREA DPI TERTANGGULANGI	LUAS SERANGAN OPT DAN BERPOTENSI TERKENA DPI	REALISASI (%)	TARGET RASIO (%)	CAPAIN (%)	REALISASI	CAPAIAN
2015	36.413,00	1.028.624,00	3,54	-	-	44,26	-
2016	7.584,00	897.963,00	0,84	-	-	185,50	-
2017	1.000,00	648.212,00	0,15	1,01	15,27	1,015,52	641,05
2018	8.525,00	544.155,00	1,57	1,60	97,92	100,00	101,94
2019	7.490,00	469.003,00	1,60	1,60	99,81	-	-
	SK. 1 TERKENDALINYA PENYEBARAN OPT DAN TERTANGGULANGINYA DPI PADA TANAMAN PERKEBUNAN						
	IKSK 1. RASIO SERANGAN OPT PERKEBUNAN YANG DITANGANI TERHADAP LUAS SERANGAN					2020 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2019	
	LUAS SERANGAN TERKENDALI	LUAS SERANGAN OPT	REALISASI (%)	TARGET RASIO (%)	CAPAIN (%)	REALISASI	CAPAIAN
2020	193.508,00	544.074,00	35,57	80,00	44,46	-	-

Sumber: Direktorat Perlinbun, 2020

IKU tahun 2020 mengalami perubahan dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Tahun 2020 Penghitungan IKSK OPT dan DPI dipisah dan dibedakan cara penghitungannya sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Rasio luas area perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI

Rasio luas area perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI diukur berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\sum = \frac{\text{Total Luas arealperkebuna yang ditanganiakibat serangan DPI}}{\text{Total Luasareal Perkebunan yang t}\mathit{erkena\ DPI}} \text{x}100\%$$

Evaluasi dan analisis Rasio luas area perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Rasio Luas Area Perkebunan yang Ditangani Dibandingkan Area Terkena DPI Tahun 2020

IK-4	TERKENDALINYA PENYEBARAN OPT DAN TERTANGGULANGINYA DPI PADA TANAMAN PERKEBUNAN						
	RASIO LUAS SERANGAN OPT TERKENDALI DAN AREA DPI TERTANGGULANGI TERHADAP SERANGAN OPT DAN BERPOTENSI TERKENA DPI					2020 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2019	
TAHUN	LUAS SERANGAN TERKENDALI DAN AREA DPI TERTANGGULANGI	LUAS SERANGAN OPT DAN BERPOTENSI TERKENA DPI	REALISASI (%)	TARGET RASIO (%)	CAPAIN (%)	REALISASI	CAPAIAN
2015	36.413,00	1.028.624,00	3,54	-	-	44,26	-
2016	7.584,00	897.963,00	0,84	-	-	185,50	-
2017	1.000,00	648.212,00	0,15	1,01	15,27	1,015,52	641,05
2018	8.525,00	544.155,00	1,57	1,60	97,92	100,00	101,94
2019	7.490,00	469.003,00	1,60	1,60	99,81	-	-
	SK. 1 TERKENDALINYA PENYEBARAN OPT DAN TERTANGGULANGINYA DPI PADA TANAMAN PERKEBUNAN						
	IKSK 2. RASIO LUAS AREA PERKEBUNAN YANG DITANGANI DIBANDINGKAN AREA TERKENA DPI					2020 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2019	
	LUAS SERANGAN TERTANGANI	LUAS TERDAMPAK DPI	REALISASI (%)	TARGET RASIO (%)	CAPAIN (%)	REALISASI	CAPAIAN
2020	1.065,00	2.700,00	39,44	40,00	98,61	-	-

Sumber: Direktorat Perlinbun, 2020

IKU tahun 2020 mengalami perubahan dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Tahun 2020 Penghitungan IKSK OPT dan DPI dipisah dan dibedakan cara penghitungannya sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Rasio luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan OPT terhadap Luas Serangan OPT yang dilaporkan dengan target 80% terealisasi sebesar 35,57% atau capaian 44,46%.

Untuk kegiatan di Direktorat Perlindungan Perkebunan (APBN) pengendalian OPT dilakukan pada areal seluas 1.101 Ha yang terdiri dari Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar seluas 800 Ha serta Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah seluas 301 Ha dan terealisasi 100% atau capaian 100%.

Penanganan OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar dilaksanakan pada 3 komoditas yaitu:

a. Kakao:
   1) Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) OPT Kakao seluas 400 Ha terealisasi 400 Ha (100%) dilaksanakan di tiga provinsi yaitu Sulawesi Tengah (150 Ha), Bali (100 Ha), dan Nusa Tenggara Barat (150 Ha).
   2) Dem Area Pengendalian OPT Kakao seluas 100 Ha terealisasi 100 Ha (100%) dilaksanakan di satu provinsi yaitu Papua.

b. Kopi: Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) OPT Kopi seluas 100 Ha terealisasi 100 Ha (100%) dilaksanakan di satu provinsi yaitu Sulawesi Utara.

c. Karet: Pengendalian OPT Tanaman Karet seluas 200 Ha terealisasi 200 Ha (100%) dilaksanakan di tiga provinsi yaitu Jambi (100 Ha), Sumatera Selatan (50 Ha), dan Kep. Bangka Belitung (50 Ha).

Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah dilaksanakan pada 3 komoditas, yaitu:

a. Cengkeh: Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) OPT Cengkeh seluas 150 Ha terealisasi 150 Ha (100%). Kegiatan dilaksanakan di 2 provinsi yaitu Sulawesi Tengah (50 Ha) dan Bali (100 Ha).

b. Pala: Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) OPT Pala seluas 50 Ha terealisasi 50 Ha (100%) dilaksanakan di satu provinsi yaitu Sulawesi Utara.

c. Lada
   1) Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) OPT Lada seluas 100 Ha terealisasi 100 Ha (100%) dilaksanakan di satu provinsi yaitu Kep. Bangka Belitung.
   2) Pengendalian OPT Tanaman Lada seluas 1 Ha terealisasi 1 Ha (100%) dilaksanakan Provinsi Kalimantan Barat.

Rasio luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan DPI terhadap luas areal perkebunan yang berpotensi terdampak dengan target 40% terealisasi 39,44% atau capaian 98,61%.

Mitigasi/penanganan risiko DPI yang dilaksanakan pada tahun 2020 seluas 1.065 Ha dilakukan melalui kegiatan:

a. Mitigasi dan Adaptasi DPI di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, bali, dan Nusa Tenggara Barat masing – masing seluas 20 Ha.
b. Operasional Brigade Kebakaran Lahan dan Kebun yang di dalamnya termasuk Operasional Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) berlokasi di Provinsi Riau seluas 150 Ha, Jambi seluas 150 Ha, Sumatera Selatan seluas 225 Ha, Kalimantan Tengah seluas 225 Ha, Kalimantan Selatan seluas 75 Ha, dan Kalimantan Timur seluas 75 Ha.
c. Demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Provinsi Kalimanatn Tengah seluas 25 Ha.

B. Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun terakhir

Realisasi Rasio Serangan OPT Perkebunan yang ditangani terhadap Luas Serangan Tahun 2020 sebesar 35,57%, atau capaian sebesar 44,46% dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu dikarenakan IKU Direktorat Jenderal Perkebunan terkait OPT dan DPI tahun 2020 mengalami perubahan dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) . Tahun 2020 Penghitungan IKSK OPT dan DPI dipisah dan terdapat perbedaan cara penghitungan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

C. Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Realisasi Kinerja Rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan dibandingkan dengan target Renstra organisasi adalah 35,57% atau capaian 44,46% .

Realisasi Kinerja Rasio luas area perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI dibandingkan dengan target Renstra organisasi adalah 39,44% atau capaian 98,61%.

D. Realisasi kinerja tahun ini dibandingkan dengan standar nasional tidak dapat dianalisis karena tidak ada standar nasional untuk Realisasi rasio luas serangan OPT terkendali dan area terkena DPI tertanggulangi terhadap luas lahan terserang OPT dan berpotensi terkena DPI.

E. Analisis penyebab capaian/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi Rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan tidak mencapai target karena beberapa hal antara lain:

1) Selama ini kegiatan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan belum menjadi perhatian/prioritas sehingga alokasi anggaran yang diberikan porsinya masih sangat kecil.
2) Pada tahun 2020 anggaran yang dialokasikan untuk pengendalian OPT mengalami refocusing akibat pandemi covid 19.

Realisasi Rasio luas area perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI mencapai target karena beberapa hal antara lain:

1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara intensif;
2) Identifikasi dan penanganan DPI di lakukan secara terkoordinasi antara pusat, daerah dan kelompoktani/pekebun;

Untuk mempertahankan/meningkatkan capaian tersebut diatas, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

1) Meningkatan anggaran kegiatan pengendalian OPT dan penanggulangan DPI
2) Menyiapkan sarana prasaranaa dan infrastruktur
3) Menyiakan SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan pendidikan.

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran) dan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian ataupun kegagalan

Beberapa kegiatan penunjang capaian atas Rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan dan Rasio luas area perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI seperti berikut:

Tabel 25. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Penggunaan Anggaran) dan Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Capaian ataupun Kegagalan

No	Kegiatan	Target			Realisasi					Nilai Efisiensi (%)
		Keuangan (Rp)	Fisik		Keuangan (Rp)	(%)	Fisik			
			Vol	Sat			Vol	Sat	%	
1	Area Penanganan OPT Tanaman Perkebunan	2.310.805	1.101	Ha	2.306.829	99,83	1.101	Ha	100,00	50,43
2	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	6.517.621	1.065	KT	6.423.629	98,56	1.065	KT	100,00	53,61
3	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	5.061.190	35	Desa	5.044.177	99,66	36	Desa	102,86	57,76
4	Perangkat Perlindungan Perkebunan	7.938.915	53	Unit	7.891.723	99,41	53	Unit	100,00	51,49
5	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	15.593	3	kasus	15.342	98,39	3	kasus	100,00	54,02
6	Peraturan/Norma/ Pedoman Perlindungan Perkebunan	3.006.478	5	Pedoman	2.992.582	99,54	5	Pedoman	100,00	51,16
	TOTAL	24.850.602			24.674.284	99,29				53,08

Sumber: Dirat Perlindungan Perkebunan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang menunjang Rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan dan Rasio luas area perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI adalah sebesar Rp. 24.674.284.000,- atau

99,29% dari pagu anggaran dengan nilai efisiensi 53,08 (efisien) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan Area penanganan OPT tanaman perkebunan Tahun 2020 dengan serapan anggaran 99,83 dan capaian fisik 100% serta nilai efisiensi 50,43% (efisien).
b. Kegiatan Area Penanganan DPI dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun dengan serapan sebesar 98,56% dan capaian fisik sebesar 100% serta nilai efisiensi 53,61% (efisien).
c. Desa Pertanian organik berbasis Komoditi perkebunan dengan serapan sebesar 99,66% dan serapan fisik sebesar 102,86% serta nilai efisiensi 57,76% (efisien).
d. Perangkat Perlindungan Perkebunan dengan serapan sebesar 99,41% dan capaian fisik sebesar 100% serta nilai efisiensi 51,49% (efisien).
e. Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha perkebunan dengan serapan sebesar 98,39% dan capaian fisik sebesar 100% serta nilai efisiensi 54,02% (efisien).
f. Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan dengan serapan sebesar 99,54% dan capaian fisik sebesar 100% serta nilai efisiensi 51,16% (efisien).

3.2.4 Sasaran Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien

Tabel 26. Capaian Sasaran Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien

NO	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efekif dan Efisien	4-1	Nilai PMRB Direktorat Jenderal Perirkebunan	32,58%	32,58%	100%

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020

Sasaran Briokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien diukur dengan Nilai PMRB Direktorat Jenderal Perkebunan. Target nilai PMRB Tahun 2020 ialah sebesar 32,58% dan tercapai sebeesar 32,58%. Selain nilai PMRB Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien juga diukur dengan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Nilai AKIP Ditjen Perkebunan merupakan IKSP dari sasaran program terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Ditjen Perkebunan. Komponen nilai AKIP terdiri dari aspek nilai perencanan, nilai pengukuran kinerja, nilai pelaporan kinerja, nilai evaluasi internal dan nilai capaian kinerja.

Tabel 27. Evaluasi dan Analisis Realisasi Nilai AKIP yang diberikan Oleh Itjen Kementerian Pertanian pada Tahun 2020

IK-5.1	TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN				
	NILAI AKIP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUAN BERDASARKAN PENILAIAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN			2020 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	
TAHUN	TARGET NILAI AKIP	REALISASI NILAI AKIP	CAPAIAN NILAI AKIP (%)	REALISASI	CAPAIAN
2015	-	77,98	-	107,58	-
2016	-	78,62	-	106,70	-
2017	79,49	79,49	100,00	105,54	99,87
2018	83,00	82,96	99,95	101,12	99,92
2019	84,00	83,89	99,87	101,83	99,87
2020	84,00	85,43	100,51	-	-

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2020

A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Realisasi IKSP nilai PMPRB sebesar 3,58 sesuai target yang disusun. Nilai AKIP Tahun 2020 adalah sebesar 85,43 atau mencapai 101,70% dari target 84. Nilai AKIP ini merupakan hasil evalusi AKIP yang dilakukan pada tahun 2020 atas Kinerja Tahun 2019 dengan rincian nilai terdiri dari aspek perencanaan 26,36%; aspek pengukuran kinerja 20,10%; aspek pelaporan kinerja 14,16%; aspek evaluasi internal 8,17%; dan aspek pencapaian kinerja 16,64%.

Catatan: Nilai AKIP 2020 (hasil penilaian AKIP 2019)

B. Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan Tabel 21 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibanding dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir yaitu:

1) Dibanding Tahun 2019, nilai AKIP Ditjenbun Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,64% atau mencapai 100,51% dan capaian Tahun 2019 masih lebih kecil dari tahun 2018 atau sebesar 0,08%;
2) Dibanding Tahun 2018, nilai AKIP Ditjenbun Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,12% atau mencapai 101,12% dan capaian Tahun 2019 masih lebih kecil dari tahun 2018 atau sebesar 99,92%;
3) Dibanding Tahun 2017, nilai AKIP Ditjenbun Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 5,54% atau mencapai 105,54% dan capaian Tahun 2019 masih lebih kecil dari tahun 2017 atau sebesar 99,87%;
4) Dibanding Tahun 2016, nilai AKIP Ditjenbun Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 6,70% atau mencapai 106,7%;

5) Dibanding Tahun 2015, nilai AKIP Ditjen Perkebunan Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 7,58% atau mencapai 107,58%.

C. Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Rentra adalah sebesar 100,51% atau dengan kategori berhasil.

D. Realisasi Kinerja Tahun ini dibandingkan dengan Standar Nasional, yaitu 85,43 (dengan asumsi standar nasional adalah 100).

E. Analisis Penyebab Capaian/Kegagalan atau Peningakatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Sesuai dengan kreteria nilai SAKIP Ditjen Perkebunan "A" yaitu sangat baik dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian nilai SAKIP Ditjen Perkebuan Tahun 2019 mengalami capaian dan terus meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan:

1) Komitmen pimpinan Ditjen Perkebunan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja semakin besar;
2) Komitmen aparatur sipil negara (ASN) Ditjen Perkebunan meningkatkan akuntabilitas kinerja semakin besar;
3) Capaian kinerja semakin meningkat
4) Capaian dari pembinaan yang dilakukan oleh semua pihak terkait dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Ditjen Perkebunan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan nilai AKIP Ditjen Perkebunan yaitu:

1) Keselarasan Renstra Ditjen Perkebunan dengan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Eselon II di bawahnya;
2) Menindaklanjuti sebagian besar atau seluruhnya hasil rekomendasi dalam LAKIN untuk perbaikan kinerja di tahun setelahnya;
3) Meningkatkan kinerja serapan maupun fisik kegiatan untuk mendukung peningkatan kinerja program;
4) Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam proses penyelenggaraan pembangunan perkebunan;
5) Meningkatkan nilai efisiensi secara optimal dengan memperhatikan kaidah yang berlaku untuk menghindari peningkatan LHA/P.

F. Analisis Efesiensi Penggunaan Sumberdaya dan Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Capaian/Kegagalan

Kegiatan yang menunjang nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan seluruh kegiatan yang melekat dalam APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 yang alokasikan kepada 92 Satker, terdiri dari 66

Satker Provinsi DK/TP, 21 Satker Kabupaten/Kota, 4 Satker Balai/UPT Pusat dan Direktorat Jenderal Perkebunan baik Satker Pusat maupun Daerah

3.2.5 Sasaran Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akutabel dan Berkualitas

Tabel 28. Capaian Sasaran Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas

NO	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akutabel dan Berkualitas	5-1	Indikator capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85%	73,09%	85,98%

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020

Nilai Kinerja (NK) Berdasarkan PMK No. 214 Tahun 2017 perubahan atas PMK 249 Tahun 2011 Tentang Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Formula yang digunakan yaitu:

$$NK = (I \times W_I)+(CH \times W_{CH}); \text{ dimana } I = (P \times W_P)+(K \times W_K)\ PK \times W_{PK})+NE \times W_E$$

I = Nilai aspek implementasi
WI = Bobot aspek implements
CH = Capaian hasil
P = Penyerapan anggaran
WP = Bobot penyerapan anggaran
K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
PK = Pencapaian keluaran
WPK= Bobot pencapaian keluaran
NE = Nilai efisiensi
WE = Bobot efisiensi
WK = Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi

Gambar 4. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART 2020

Evaluasi dan analisis realisasi dan capaian nilai AKIP tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 29 sebagai berikut:

Tabel 29. Evaluasi dan Analisis Nilai Kinerja (NK) Ditjen Perkebunan Tahun 2020

IK-5.2	TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN				
	NILAI KINERJA (NK) BERDASARKAN PMK 214/17 TENTANG PENGUKURAN KINERJA ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L			2020 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	
TAHUN	TARGET NILAI AKIP	REALISASI NILAI AKIP	CAPAIAN NILAI AKIP (%)	REALISASI	CAPAIAN
2015	-	-	-	-	-
2016	-	81,19	-	102,43	-
2017	85,00	90,05	105,94	92,35	85,32
2018	90,00	75,10	83,44	110,73	108,33
2019	92,00	84,45	91,75	86,54	86,58
2020	92,00	73,09	79,44	-	-

Sumber : Ditjen. Perkebunan, 2020 (diolah)

A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan diperoleh realisasi nilai kinerja (NK) Ditjen Perkebunan Tahun 2020 sebesar 73,09% atau mencapai 79,44% dan masuk dalam kategori CUKUP BERHASIL.

B. Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun terakhir

Realisasi dan capaian nilai kinerja (NK) Ditjen Perkebunan Tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi NK tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya yaitu:

1) Dibanding dengan Tahun 2019 realisasi NK Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 11,36 dan capaian NK menurun 12,31%.
2) Dibanding dengan Tahun 2018 realisasi NK Tahun 2019 mengalami peningkatan 9,35% dan capaian NK meningkat 8,35%.
3) Dibanding dengan Tahun 2017 realisasi NK Ditjen Perkebunan Tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 5,60%, sedangkan capaian NK 2019 mengalami penurunan 14,15%;
4) Dibanding dengan Tahun 2016, NK Ditjen Perkebunan Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,26%.

C. Capaian Kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra adalah Mencapai 79,44%.

D. Capaian Kinerja Tahun ini dibandingkan dengan Standar Nasional adalah 73,09% (dengan asumsi nilai tertinggi 100%).

E. Analisis Penyebab Capaian/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Nilai Kinerja (NK) Ditjen perkebunan tidak mencapai target 92,00 karena disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sudah meningkat dibanding Tahun 2019 namun belum maksimal yaitu 67,77%;
2) Rata-rata nilai Satker yang diukur dengan persentasi pencapaian kinerja relatif rendah, dimana baru mencapai 50,11%, dikarenakan terdapat beberapa satker yang capaian keluarannya masih 0 disebabkan belum melaksanakan penginputan atau dilaporkan dalam aplikasi SMART Kemenkeu serta masih terdapat output yang tidak mempunyai indikator.

Dengan permasalahan tersebut diharapkan dapat melakukan perbaikan kinerja, sebagai berikut:

1) Menyusun rencana kerja/jadwal pelaksanaan kegiatan (timeline) secara terinci dengan mengacu besaran target penyerapan per triwulan yang ditetapkan Menteri Pertanian;
2) Melakukan input data sesuai jadwal waktu yang ditetapkan;
3) Pusat membuat asistensi dalam penginputan data yang diminta;

3.2.6 Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan

Tabel 30. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan 2020

NO	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan	6-1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar	3 (Skala Likert)	3,51 (Skala Likert)	117%

Sumber: Ditjen Perkebunan 2020

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan diukur dengan menggunakan formula sebagaimana berikut:

$$\left(\frac{\text{Nilai IKM BBP2TP Surabaya} + \text{Nilai IKM BBP2TP Medan} + \text{Nilai IKM BBP2TP Ambon} + \text{Nilai IKM BPTP Pontianak}}{4}\right) \times 100\%$$

Responden terdiri dari pengusaha, petani, kelompok tani, mahasiswa, dan penerima layanan publik lain. Pengolahan dan Hasil Pengukuran IKM atas layanan Publik Direktorat Jenderal perkebunan seperti pada tabel berikut:

Tabel 31. Evaluasi dan Analisis Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) atas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018 – 2020

IK-6-1	Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan			2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya	
Tahun	Target Nilai	Realisasi Nilai Kinerja	Capaian Nilai Kinerja (%)	Realisasi	Capaian
2018	3,00	3,50	116,67	100,28	100,28
2019	3,00	3,58	119,33	98,04	98,04
2020	3,00	3,51	117		

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan nilai rata-rata sembilan (9) unsur layanan lingkup Unit Pelaksana Teknis Pusat (BBPPTP Medan, BBPPTP Surabaya, BBPPTP Ambon dan

BPTP Pontianak) meliputi: persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; sarana dan prasaranaa; penanganan pengaduan.

A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2020 sebesar 3,51 (nilai skala likert 1-4) atau mencapai 117% dibanding target dengan kategori sangat berhasil.

B. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dibandingkan Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Dari tabel 31 dapat dijelaskan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan realisasi kinerja dan capaian kinerja dibandingkan tahun 2020 sebagai berikut:

- dibanding Tahun 2019 realisasi kinerja mengalami penurunan sebesar 1,96%;
- dibanding Tahun 2018 realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,28%;

C. Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2020 dibanding target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra mencapai 117%.

D. Realisasi Kinerja Tahun ini dibandingkan dengan Standar Nasional

Tidak dapat dianalisis karena tidak ada standar nasional untuk Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan

E. Analisis Penyebab Capaian/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Adanya pandemi covid-19 menyebabkan pelayanan menjadi agak terkendala, dikarenakan adanya kebijakan PSBB wilayah serta penerapan WFO/WFH. Hal ini membuat petugas kurang optimal dalam memberikan pelayanan. Selain itu, beberapa laporan serangan insidentil juga tidak bisa segera ditindaklanjuti akibat adanya kebijakan pemerintah daerah yang melarang beberapa wilayah untuk dikunjungi sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19. Alternatif solusi yang telah dilakukan ialah mengoptimalkan penggunaan media elektronik/secara daring melalui aplikasi dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat sehingga pengguna layanan tidak harus datang ke kantor untuk mendapatkan layanan.

F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Penggunaan Anggaran) dan Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Capaian

Untuk mendukung pencapaian target sasaran meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan dan indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan maka analisis efisiensi penggunaan sumberdaya kegiatan utama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan (BBPPTP Medan, BBPPTP Surabaya, BBPPTP Ambon dan BPTP Pontianak) berupa dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan seperti berikut.

Tabel 32. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Kegiatan Utama dalam Mencapai Target Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI					NILAI EFISIENSI (%)
		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	(%)	FISIK			
		Rp	VOLUME	SAT	Rp		VOLUME	SAT	(%)	
1	Penyediaan, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	2.547.530.000	88.734.650	Batang	2.213.064.939	86,87	85.729.683	Batang	96,61	75,21
2	Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan	4.040.313.000	19	Paket Teknologi	3.808.239.535	94,26	19	Paket Teknologi	100	64,36
3	Layanan Sarana dan Prasaranaa Internal	17.694.809.000	1	Layanan	16.970.517.918	95,91	1	Layanan	100	60,23
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	12.713.987.000	1	Layanan	10.573.079.489	83,16	1	Layanan	100	92,10
5	Layanan Perkantoran	54.113.713.000	1	Layanan	49.931.715.990	92,27	1	Layanan	100	69,32
	TOTAL/RATA-RATA	91.110.352.000			33.564.901.881	90,49				72,98

Sumber : LAKIN UPT Lingkup Ditjen Perkebunan, 2020

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya kegiatan utama dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan diatas pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan tanaman perkebunan didukung dengan anggaran 91,110 milyar dengan realisasi sebesar 90,49%, dan nilai efisiensi sebesar 72,98% mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi (efisien).

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2020

3.3.1 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan utama Direktorat Jenderal Perkebunan dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 33. Realisasi dan Capaian Fisik Kegiatan Ditjen Perkebunan Tahun 2020 Berdasarkan Kegiatan Utama

NO	KODE I KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	% Fisik
1	1777 | Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	55,954,418,000	54,655,982,115	97.68	100
2	1779 | Dukungan Perlindungan Perkebunan	24,850,602,000	24,674,094,027	99.29	101
3	1780 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	218,266,234,000	202,149,592,115	92.62	100
4	1781 | Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	91,110,352,000	85,275,821,709	93.60	99,32
5	5888 | Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	113,036,887,000	103,117,248,336	91.22	99,23
6	5889 | Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	89,733,691,000	86,694,141,220	96.61	93,41
7	5890 | Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	407,105,687,000	351,862,487,159	86.43	95,63

Sumber: OM-SPAN Kemenkeu, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 33 dapat dijelaskan bahwa capaian serapan Ditjen Perkebunan dikelompokkan berdasarkan kegiatan utama adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan penyerapan anggaran sebesar 97,60% dan capaian fisik sebesar 100%.
2. Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan penyerapan anggaran sebesar 99,04% dan capaian fisik sebesar 101%.
3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dengan penyerapan anggaran sebesar 92,57% dan capaian fisik sebesar 100%.
4. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan dengan penyerapan anggaran sebesar 93,47% dan capaian fisik sebesar 99,32%.
5. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah dengan penyerapan anggaran sebesar 91,22% dan capaian fisik sebesar 99,23%.
6. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan penyerapan sebesar 96,60% dan capaian fisik sebesar 93,41%.
7. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan dengan serapan anggaran sebesar 86,40% dan capaian fisik sebesar 95,63%.

3.3.2 Penyerapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Penyerapan anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja sosial . Realisasi keuangan dan fisik kegiatan berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 34. Serapan dan Capaian Fisik Kegiatan Ditjen Perkebunan Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja

UNIT KERJA/JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
DITJEN. PERKEBUNAN	**1,000,057,871,000**	**907,970,706,977**	**90.79**
51 BELANJA PEGAWAI	78,000,000,000	66,911,307,557	85.78
52 BELANJA BARANG	874,591,621,000	796,483,471,125	91.07
53 BELANJA MODAL	47,466,250,000	44,575,928,295	93.91
57 BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0.00

Sumber: SMART/OM-SPAN Kemenkeu, 2020 (diolah)

Capaian serapan berdasarkan jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai terealisasi sebesar 85,78% dengan capaian fisik sebesar 100%.
2. Belanja Barang terealisasi sebesar 91,07% dengan capaian fisik sebesar 100%.
3. Belanja Modal terealisasi sebesar 93,91% dengan capaian fisik sebesar 100%.

3.3.3 Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan Ditjen Perkebunan

Realisasi Anggaran berdasarkan output kegiatan mencerminkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) prioritas utama Eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan. Realisasi berdasarkan *output* Kegiatan secara terinci dijelaskan pada Lampiran 4. Secara umum capaian output kegiatan Ditjen Perkebunan adalah sebagai berikut:

A. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar yaitu:

1. Pengembangan Tanaman Kopi dengan serapan sebesar 96,86% dan capaian fisik 100%.
2. Pengembangan Tanaman Kakao dengan serapan sebesar 98,17% dan capaian fisik 100%.
3. Pengembangan Tanaman Karet dengan penyerapan sebesar 97,75% dan capaian fisik sebesar 100%.

4. Pengembangan Tanaman Kelapa dengan serapan sebesar 97,72% dan capaian fisik sebesar 100%.
5. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya dengan serapan sebesar 97,56% dan capaian fisik sebesar 100%.
6. Pengembangan Tanaman Sagu dengan serapan sebesar 99,49% dan capaian fisik sebesar 100%.
7. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan serapan sebesar 95,74% dan capaian fisik sebesar 100%.
8. Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan serapan sebesar 98,84% dan capaian fisik sebesar 100%.

B. Dukungan Perlindungan Perkebunan

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan dukungan perlindungan perkebunan antara lain yaitu:

1. Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 99,83% dan capaian fisik 100%.
2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun dengan serapan sebesar 98,56% dan capaian fisik 100%.
3. Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan dengan serapan sebesar 99,66% dan capaian fisik 106%.
4. Perangkat Perlindungan Perkebunan Fasilitasi dengan serapan sebesar 99,40% dan capaian fisik 100%.
5. Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan serapan sebesar 98,39% dan capaian fisik 100%.
6. Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan serapan sebesar 99,54% dan capaian fisik 100%.

C. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya yaitu:

1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan serapan sebesar 96,78% dan capaian fisik 100%.
2. Layanan Sarana dan Prasaranaa Internal dengan serapan sebesar 95,89% dan capaian fisik 100%.
3. Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan serapan sebesar 96,54% dan capaian fisik 100%.

4. Layanan Perkantoran dengan serapan sebesar 77,85% dan capaian fisik 100%.

D. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan yaitu:

1. Penyediaan, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 95,15% dan capaian fisik 96,61%;
2. Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 95,89% dan capaian fisik 100%;
3. Layanan Sarana dan Prasaranaa Internal dengan serapan sebesar 98,32% dan capaian fisik 100%.
4. Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan serapan sebesar 89,09% dan capaian fisik 100%.
5. Layanan Perkantoran dengan serapan sebesar 92,89% dan capaian fisik 100%.

E. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah yaitu:

a. Pengembangan Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh dengan serapan sebesar 97,84% dan capaian fisik 96,60%;
b. Pengembangan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) dengan serapan sebesar 88,80% dan capaian fisik 100%;
c. Pengembangan Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya) dengan serapan sebesar 96,31% dan capaian fisik 99,57%
d. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Tanaman Semusim dan Rempah dengan serapan sebesar 100% dan capaian fisik sebesar 100%.
e. Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Rempah dengan serapan sebesar 97,13% dan capaian fisik sebesar 100%.

F. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yaitu:

1. Fasilitasi Sarana dan Prasaranaa Pasca panen tanaman perkebunan dengan serapan sebesar 98,09% dan capaian fisik 100%;
2. Fasilitasi Sarana dan Prasaranaa Pengolahan Hasil Perkebunan dengan serapan sebesar 94,91% dan capaian fisik 96,09%;
3. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan serapan sebesar 96,71% dan capaian fisik sebesar 77,33%.
4. Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan dengan serapan sebesar 95,55% dan capaian fisik sebesar 100%.
5. Akselarasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat dengan serapan sebesar 94,58% dan capaian fisik sebesar 100%.
6. Pemasaran Hasil Perkebunan dengan serapan sebesar 91,07% dan capaian fisik sebesar 97,14%.
7. Peraturan/Norma/Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan serapan sebesar 97,66% dan capaian fisik sebesar 83,33%.

G. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan yaitu:

1. Nursery dengan serapan sebesar 91,75% dan capaian fisik 100%;
2. Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan dengan serapan sebesar 58,90% dan capaian fisik 95,02%.
3. Rekomendasi Benih Perkebunan dengan serapan sebesar 87,66% dan capaian fisik 111,19%.
4. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Perbenihan Perkebunan dengan serapan sebesar 87,53% dan capaian fisik sebesar 84,38%..
5. Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan dengan serapan sebesar 96,61% dan capaian fisik sebesar 160%.
6. Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 94,24% dan capaian fisik sebesar 92,98%.

3.3.4 Realisasi Anggaran Berdasarkan Satker Lingkup Ditjen Perkebunan

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebanyak 514 yang tersebar di 34 provinsi. Dengan keterbatasan APBN, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketidakberpihakan kepada kebupaten/kota yang ingin melaksanakan pembangunan perkebunan, maka pada Tahun 2020 Satker yang mengelolaan dana APBN baik Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan di kelola oleh Dinas Provinsi yang menangani Perkebunan. Oleh

karena itu pada Tahun 2020 penyelenggaraan pembangunan perkebunan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan yang berjumlah 38 satker yang terdiri atas Satker Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat), Satker UPT Pusat (4 satker) dan Satker Dinas Provinsi (33 satker).

Kinerja Ditjen Perkebunan sangat tergantung pada kinerja satker-satkernya, oleh karena itu upaya percepatan dan pencapaian target terus dilakukan dengan cara koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi. Dengan didukung oleh Tim Monev lingkup Ditjen Perkebunan baik pusat dan daerah dan dengan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2020 telah mampu diperoleh informasi secara up to date setiap bulanan sehingga setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan terinfo ke pimpinan Ditjen Perkebunan.

Capaian Satker tersebut dilakukan evaluasi dan analisis sehingga seecara sederhana diperoleh prestasi satker yang secara triwulanan disampaikan kepada Gubernur sebagai penaggungjawab daerah dan para Unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan sebagai penanggungjawab kegiatan.

Capaian keuangan per satker lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dapat dilihat lampiran 5.

3.3.5 Permasalahan Umum Realisasi Anggaran Tahun 2020

Permasalahan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Adanya reorganisasi di lingkungan dinas berdampak terhadap terlambatnya proses pengajuan pelelangan barang dan jasa terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP) sehingga proses pelelangan mengalami keterlambatan, dan pendistribusian benih oleh pihak ketiga kepada petani juga terlambat;
2. Masih banyak daerah yang lambat dalam hal proses verifikasi dan pengesahan SK CP-CL;
3. Pelaksanaan kontrak sebagian besar belum dilaksanakan sesuai komitmen yang telah disepakati;
4. Adanya dinamika dalam revisi anggaran (DIPA maupun POK) sampai dengan Triwulan ke-4 Tahun 2020;
5. Terjadinya perubahan baik lokasi maupun kelompok tani yang tidak dilaporkan;
6. Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan perlu dijabarkan ke

dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) namun penyusunannya seringkali terlambat atau bahkan tidak dibuat oleh penanggung jawab kegiatan;

7. Penetapan SK Pelaksana kegiatan Provinsi/Kabupaten seringkali terlambat, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawalan pengendalian OPT belum terkoordinir;
8. Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu dan sasaran. Untuk itu perlu pengawalan setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa di ULP;
9. Jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun;
10. Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahun anggaran;
11. Sistem pengadaan barang dan jasa dengan sistem satu pintu dan Keterbatasan SDM menyebabkan pelelangan kegiatan mengantri dan mengakibatkan pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan;
12. Pengawalan pelaksanaan kegiatan di daerah sulit dilaksanakan.
13. Masih berlangsungnya pandemi COVID 19, dan adanya perpanjangan pemberlakukan PSBB sehingga ruang gerak satker pusat maupun daerah masih terbatas meskipun telah dilakukan upaya-upaya percepatan realisasi kegiatan namun tidak begitu efektif mengingat tingkat kekhawatiran masyarakat atas pandemi COVID 19 masih tinggi;

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2020. Capaian kinerja Ditjen Perkebunan sesuai PK Ditjen Perkebunan pada tahun 2020 yaitu meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan terealisasi 12,91% melebihi target 1,8% (tercapai 717,20%) dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Berdasarkan indikator sasaran kinerja terhadap realisasi nilai ekspor produk perkebunan tahun 2020 mencapai US$ 27,7 milyar dari target US$ 25 miyar (110,31%) atau masuk dalam kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian nilai ekspor produk perkebunan tahun 2020 didukung dengan adanya peningkatan harga yang terjadi pada produk perkebunan sehingga meningkatkan nilai ekspor yang diterima.

Tingkat kemanfaatan sarana perkebunan terealisasi 92,59% dari target 80% (116,05%) atau masuk dalam kategori sangat berhasil. Capaian yang diraih melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 80%. Dari realisasi yang diperoleh menandakan bahwa hampir semua sarana perkebunan yang disalurkan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 dimanfaatkan oleh kelompok tani penerima bantuan.

Rasio luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan OPT terhadap Luas Serangan OPT yang dilaporkan dengan target 80% realisasi 35,57% atau tercapai 44,46%. Rasio luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan DPI terhadap luas areal perkebunan yang berpotensi terdampak dengan target 40% terealisasi 39,44% (98,61%). Kegiatan untuk mendukung pencapaian rasio tersebut yaitu jumlah risiko DPI tanaman yang berhasil dimitigasi seluas 1.065 Ha.

Sasaran birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efekif dan efisien dengan indikator Nilai PMPRB tercapai sebesar 32,58 sama dengan target yang ditetapkan dalam PK. Capaian ini mencapai 100% dari target sasaran dan masuk dalam kategori berhasil.

Sasaran Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) terealisasi 73,09 tercapai 85,98% dari target 85 masuk dalam kategori berhasil.

Sasaran kinerja meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan (Nilai Skala Likert 1-4) terealisasi sebesar 3,51 dari target 3 atau mencapai 117% masuk dalam kategori sangat berhasil.

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

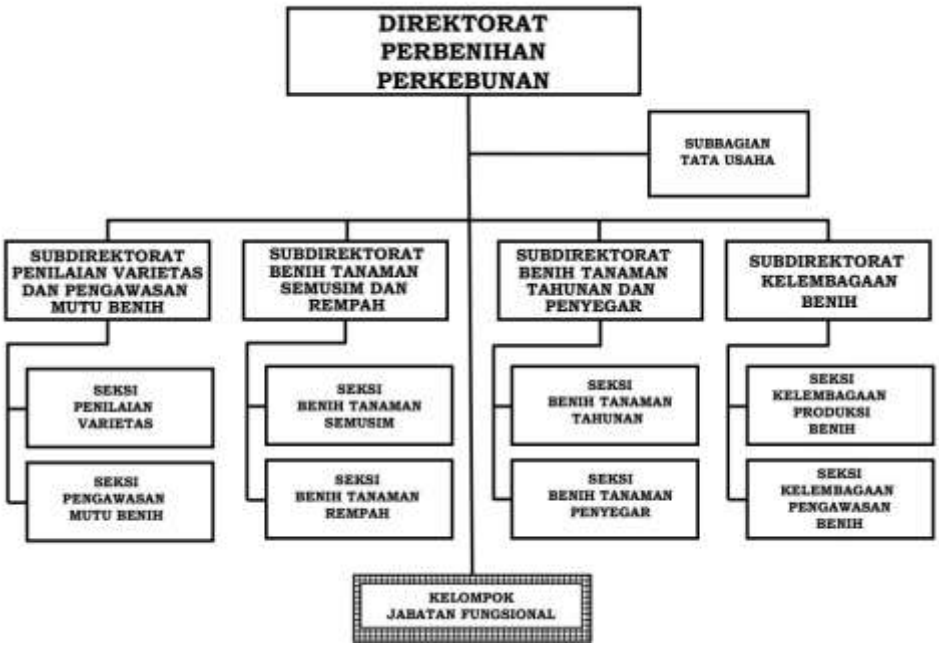
DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBDIREKTORAT PENILAIAN VARIETAS DAN PENGAWASAN MUTU BENIH
SUBDIREKTORAT BENIH TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH
SUBDIREKTORAT BENIH TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR
SUBDIREKTORAT KELEMBAGAAN BENIH
SEKSI PENILAIAN VARIETAS
SEKSI PENGAWASAN MUTU BENIH
SEKSI BENIH TANAMAN SEMUSIM
SEKSI BENIH TANAMAN REMPAH
SEKSI BENIH TANAMAN TAHUNAN
SEKSI BENIH TANAMAN PENYEGAR
SEKSI KELEMBAGAAN PRODUKSI BENIH
SEKSI KELEMBAGAAN PENGAWASAN BENIH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

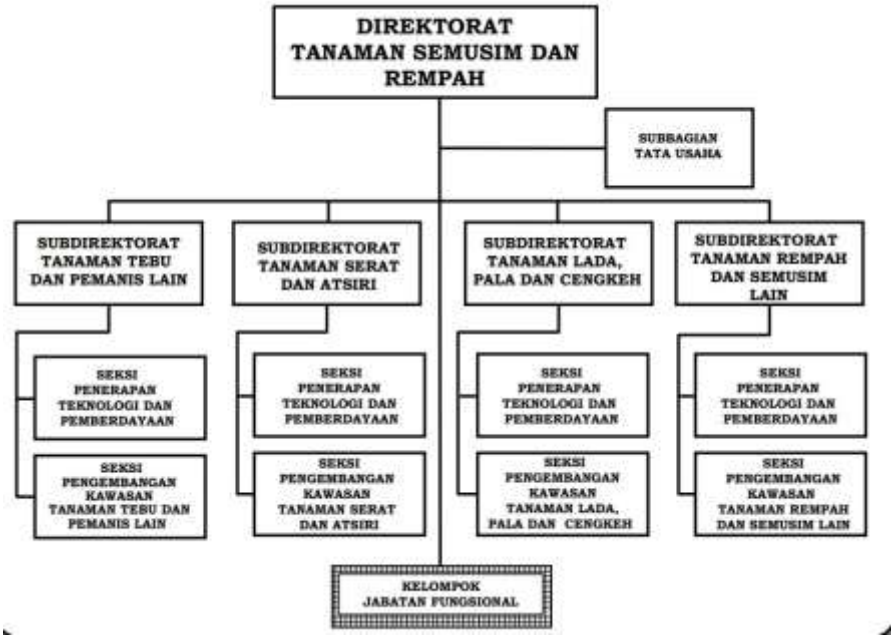
DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBDIREKTORAT TANAMAN TEBU DAN PEMANIS LAIN
SUBDIREKTORAT TANAMAN SERAT DAN ATSIRI
SUBDIREKTORAT TANAMAN LADA, PALA DAN CENGKEH
SUBDIREKTORAT TANAMAN REMPAH DAN SEMUSIM LAIN
SEKSI PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN
SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN TEBU DAN PEMANIS LAIN
SEKSI PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN
SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN SERAT DAN ATSIRI
SEKSI PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN
SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN LADA, PALA DAN CENGKEH
SEKSI PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN
SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN REMPAH DAN SEMUSIM LAIN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

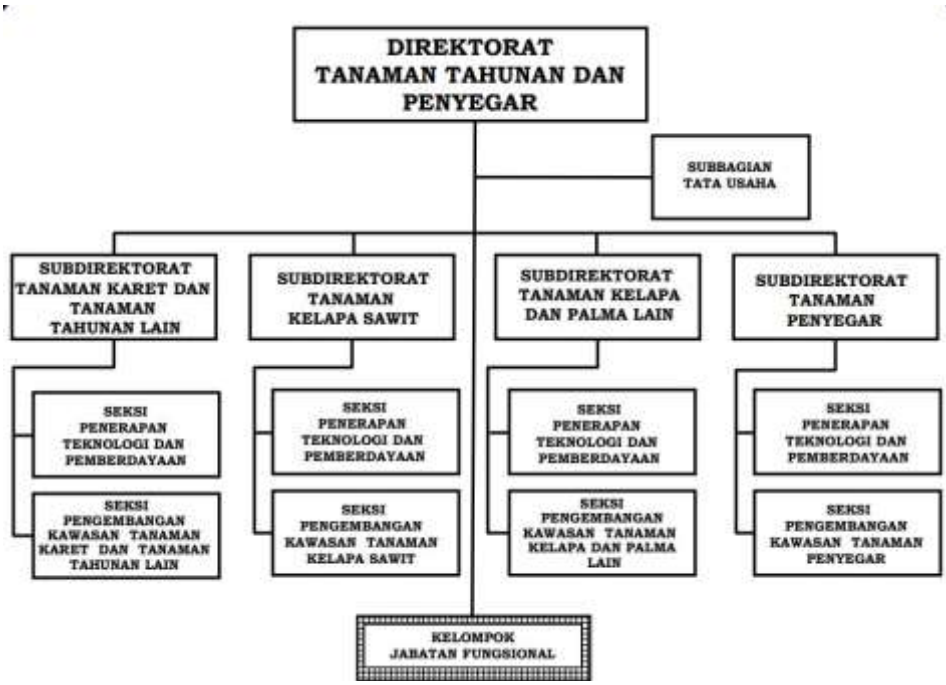
DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBDIREKTORAT TANAMAN KARET DAN TANAMAN TAHUNAN LAIN
SUBDIREKTORAT TANAMAN KELAPA SAWIT
SUBDIREKTORAT TANAMAN KELAPA DAN PALMA LAIN
SUBDIREKTORAT TANAMAN PENYEGAR
SEKSI PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN
SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN KARET DAN TANAMAN TAHUNAN LAIN
SEKSI PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN
SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN KELAPA SAWIT
SEKSI PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN
SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN KELAPA DAN PALMA LAIN
SEKSI PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN
SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN PENYEGAR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

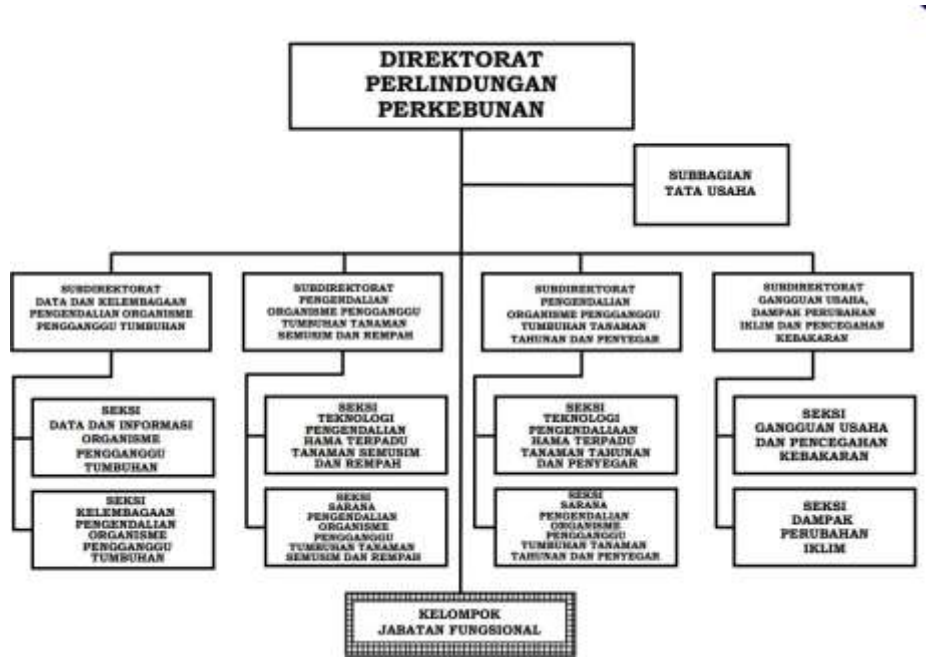
DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBDIREKTORAT DATA DAN KELEMBAGAAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
SUBDIREKTORAT PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH
SUBDIREKTORAT PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR
SUBDIREKTORAT GANGGUAN USAHA, DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN
SEKSI DATA DAN INFORMASI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
SEKSI KELEMBAGAAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
SEKSI TEKNOLOGI PENGENDALIAN HAMA TERPADU TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH
SEKSI SARANA PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH
SEKSI TEKNOLOGI PENGENDALIAAN HAMA TERPADU TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR
SEKSI SARANA PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR
SEKSI GANGGUAN USAHA DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN
SEKSI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

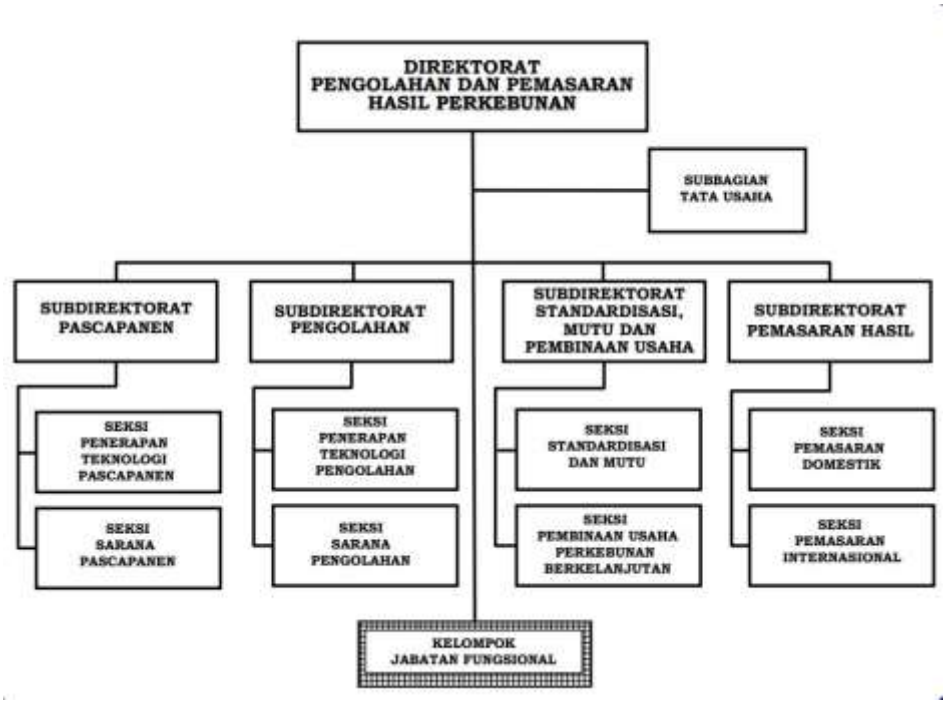
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBDIREKTORAT PASCAPANEN
SUBDIREKTORAT PENGOLAHAN
SUBDIREKTORAT STANDARDISASI, MUTU DAN PEMBINAAN USAHA
SUBDIREKTORAT PEMASARAN HASIL
SEKSI PENERAPAN TEKNOLOGI PASCAPANEN
SEKSI SARANA PASCAPANEN
SEKSI PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN
SEKSI SARANA PENGOLAHAN
SEKSI STANDARDISASI DAN MUTU
SEKSI PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN
SEKSI PEMASARAN DOMESTIK
SEKSI PEMASARAN INTERNASIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Lampiran 2

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
TAHUN 2020

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : http://ditjenbun.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DITJEN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kasdi Subagyono
Jabatan : Direktur Jenderal Perkebunan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Syahrul Yasin Limpo	Kasdi Subagyono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DITJEN PERKEBUNAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Tambah Dan Daya Saing Komoditas Perkebunan	1-1	Pertumbuhan Nilai ekspor perkebunan	1.8 %
2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Perkebunan yang Sesuai Kebutuhan	2-1	Tingkat kemanfaatan sarana perkebunan	80 %
3	Pengendalian Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	3-1	Rasio serangan OPT Perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan	80 %
		3-2	Rasio luas area Perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40 %
4	Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien	4-1	Nilai PMRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32.58 Nilai
5	Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas	5-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85.00 Nilai
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan	6-1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan	3.00 Nilai IKM (skala likert)

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Rp. 1,000,057,871,000

Jakarta, Desember 2020

Pihak Kedua

Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama

Kasdi Subagyono

KONTRAK KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL Perkebunan

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka dengan ini saya selaku **Direktur Jenderal Perkebunan** menerima pendelegasian (*cascading*) standar kinerja **Menteri Pertanian Republik Indonesia** yang diberikan kepada saya.

Standar kinerja ini merepresentasikan capaian kinerja yang harus saya wujudkan sebagai indikator keberhasilan unit kerja yang saya pimpin. Saya berjanji akan mewujudkan target kinerja yang direncanakan sesuai lampiran pada kontrak kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya selaku **Direktur Jenderal Perkebunan.**

Kontrak kinerja ini merupakan komitmen saya selaku **Direktur Jenderal Perkebunan** untuk mewujudkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai organisasi berkinerja tinggi yang transparan dan akuntabel sebagai bagian penting dari revolusi mental instansi pemerintah.

Demikian kontrak kinerja ini disusun untuk dilaksanakan di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Jakarta, Desember 2020

Menteri Pertanian Republik Indonesia	**Direktur Jenderal Perkebunan**
SYAHRUL YASIN LIMPO	**KASDI SUBAGYONO**

Lampiran 3

SASARAN PROGRAM (SP) DAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP) DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2020

NO	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Sasaran meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan	1-1	Kinerja pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	1,8%
2	Penyediaan prasaranaa dan sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan	2-1	Tingkat kemanfaatan sarana perkebunan	80%
3	Pengendalian penyerangan OPT dan DPI pada tanaman perkebunan	3-1	Rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan	80%
		3-2	Rasio luas areal perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40%
4	Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efekif dan efisien	4-1	Nilai PMRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,58%
5	Pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akutabel dan berkualitas	5-1	Indikator capaian kinerja nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85
6	Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan	6-1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Publik Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar	3 (Skala Likert)

Lampiran 4

Realisasi Berdasarkan Output Kegiatan Ditjen Perkebunan Tahun 2020

No.	UK. Eselon I	UK. Eselon II	No. Output	Output Kegiatan	Volume	Satuan	REALISASI FISIK		Anggaran			KET
							Volume	(%)	Pagu	Realisasi	%	
1	05-Ditjen Perkebunan	03-Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	146	1777.001-Kawasan Kopi	7.970,00	Ha	7.970,00	100,00	8.754.617.000	8.343.538.317	95,30	
		03-Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	147	1777.002-Kawasan Kakao	4.990,00	Ha	4.990,00	100,00	9.988.486.000	9.733.624.150	97,45	
		03-Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	148	1777.003-Kawasan Karet	4.075,00	Ha	4.075,00	100,00	9.077.936.000	8.868.631.449	97,69	
		03-Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	149	1777.004-Kawasan Kelapa	12.191,00	Ha	12.191,00	100,00	10.853.774.000	10.452.412.300	96,30	
		03-Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	150	1777.005-Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya)	2.310,00	Ha	2.310,00	100,00	6.697.532.000	6.488.951.930	96,89	

		03-Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	151	1777.006-Area Tanaman Sagu	400,00	Ha	400,00	100,00	1.346.800.000	1.340.835.000	99,56	
		05-Direktorat Perlindungan Perkebunan	154	1779.001-Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	1.101,00	Ha	1.101,00	100,00	2.310.805.000	2.304.439.400	99,72	
		05-Direktorat Perlindungan Perkebunan	155	1779.002-Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	1.065,00	Ha	1.065,00	100,00	6.517.621.000	6.423.629.144	98,56	
		05-Direktorat Perlindungan Perkebunan	156	1779.003-Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	35,00	Desa	37,00	105,71	5.061.190.000	5.044.207.254	99,66	
		05-Direktorat Perlindungan Perkebunan	157	1779.004-Perangkat	53,00	Unit	53,00	100,00	7.938.915.000	7.875.223.692	99,20	

				Perlindungan Perkebunan								
		05-Direktorat Perlindungan Perkebunan	158	1779.006-Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan.	3,00	Kasus	3,00	100,00	15.593.000	15.342.300	98,39	
		06-Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	159	1780.950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1,00	Layanan	1,00	100,00	67.504.925.000	64.128.662.985	95,00	
		06-Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	160	1780.951-Layanan Sarana dan Prasaranaa Internal	1,00	Layanan	1,00	100,00	15.832.198.000	15.155.951.968	95,73	
		06-Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	161	1780.970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	1,00	Layanan	1,00	100,00	88.801.508.000	84.535.367.500	95,20	
		06-Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan	162	1780.994-Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	1,00	100,00	46.127.603.000	35.818.190.737	77,65	
		07-Balai Besar Perbenihan dan Proteksi	163	1781.001-Penyediaan, Pengawasan	88.734.650,00	Batang	85.729.683,00	96,61	2.547.530.000	2.213.064.939	86,87	

		Tanaman Perkebunan		dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan								
		07-Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan	164	1781.002-Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan	19,00	Paket Teknologi	19,00	100,00	4.040.313.000	3.808.239.535	86,87	
		07-Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan	165	1781.951-Layanan Sarana dan Prasaranaa Internal	1,00	Layanan	1,00	100,00	17.694.809.000	16.970.517.918	94,26	
		07-Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan	166	1781.970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	1,00	Layanan	1,00	100,00	12.713.987.000	10.573.079.489	83,16	
		07-Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan	167	1781.994-Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	1,00	100,00	54.113.713.000	49.931.715.990	92,27	
		08-Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah	168	5888.001-Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh	22.919,00	Ha	22.139,00	96,60	21.439.713.000	20.864.732.990	97,32	

		08-Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah	169	5888.002-Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	3.181,00	Ha	3.181,00	100,00	81.374.092.000	71.176.787.150	87,47	
		08-Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah	169A	5888.002-Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) ABT	10.000,00	Ha	10.000,00	100,00	68.220.000.000	59.249.382.000	86,85	
		08-Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah	170	5888.003-Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya)	1.168,00	Ha	1.163,00	99,57	6.115.582.000	5.845.085.350	95,58	
		09-Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	173	5889.001-Sarana dan Prasaranaa Pasca panen tanaman perkebunan	146,00	Unit	146,00	100,00	40.164.017.000	38.974.037.077	97,04	
		09-Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	174	5889.002-Sarana dan Prasaranaa Pengolahan Hasil Perkebunan	128,00	Unit	123,00	96,09	34.007.479.000	32.033.584.989	94,20	

		09-Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	175	5889.003-Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	75,00	Lokasi	58,00	77,33	2.587.105.000	2.343.443.600	90,58	
		09-Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	176	5889.004-Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan	6,00	Surat Registrasi	6,00	100,00	1.016.580.000	971.312.475	95,55	
		09-Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	177	5889.005-Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	3.900,00	Pekebun	3.900,00	100,00	3.385.937.000	3.141.841.800	92,79	
		09-Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	178	5889.006-Pemasaran Hasil Perkebunan	35,00	MOU	34,00	97,14	440.015.000	400.727.622	91,07	
		09-Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	179	5889.007-Peraturan/Norma/Pedoman Pengolahan dan Pemasaran	6,00	Pedoman	5,00	83,33	8.132.558.000	7.942.458.538	97,66	

				Hasil Perkebunan								
		10-Direkrorat Perbenihan Perkebunan	180	5890.001-Nursery	29,00	Unit	8,00	27,59	21.436.332.000	19.410.289.663	90,55	
		10-Direkrorat Perbenihan Perkebunan	181	5890.002-Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan	3.373,00	Ha	3.205	95,02	88.093.019.000	51.524.584.671	58,49	
		10-Direkrorat Perbenihan Perkebunan	182	5890.003-Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	143,00	Rekomendasi	159,00	111,19	2.607.559.000	2.232.404.753	85,61	
		10-Direkrorat Perbenihan Perkebunan	183	5890.004-Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Perbenihan Perkebunan	64,00	Lokasi	54,00	84,38	1.942.068.000	1.665.602.845	85,76	
		10-Direkrorat Perbenihan Perkebunan	185	5890005|Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan	5,00	Kegiatan	8,00	160,00	7.125.736.000	6.883.925.280	96,61	

Lampiran 5

Realisasi Berdasarkan Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020

NO.	SATKER PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PAGU RKAKL	REALISASI	%	FISIK
1	029101 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	1.433.532.000	1.397.280.800	97,47	100
2	029161 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	27.155.301.000	26.271.917.800	96,75	98
3	039098 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	1.432.748.000	1.308.637.629	91,34	100
4	039153 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	15.915.679.000	13.139.158.616	82,55	94
5	049058 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. D.I. YOGYAKARTA	804.105.000	801.783.683	99,71	100
6	049089 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. D.I. YOGYAKARTA	2.449.665.000	2.438.616.378	99,55	100
7	059114 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	1.242.800.000	1.219.490.000	98,12	100
8	059180 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	15.521.512.000	14.301.343.777	92,14	98
9	060100 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	1.187.650.000	1.183.022.180	99,61	100
10	060102 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	13.761.687.000	13.582.241.500	98,70	100
11	079077 | DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA UTARA	1.198.941.000	1.088.390.398	90,78	100
12	079126 | DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA UTARA	11.792.624.000	11.135.602.444	94,43	100
13	089083 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	1.033.580.000	1.026.946.300	99,36	100
14	089132 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	5.622.239.000	5.562.017.760	98,93	100

15	099270 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	1.122.623.000	1.105.377.000	98,46	100
16	099316 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	4.567.662.000	3.633.829.900	79,56	92
17	090560 | DINAS PERKEBUNAN KAB. INDRAGIRI HILIR	2.304.693.000	2.262.627.111	98,17	100
18	091328 | DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA KAB. KEPULAUAN MERANTI	9.880.137.000	9.789.478.800	99,08	100
19	109071 | DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	1.340.600.000	1.318.452.580	98,35	100
20	109120 | DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	14.768.672.000	14.669.732.450	99,33	100
21	100841 | DINAS PERKEBUNAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. TEBO	542.932.000	478.685.081	88,17	100
22	119081 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.544.350.000	1.473.945.910	95,44	100
23	119132 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	19.442.653.000	19.091.162.908	98,19	100
24	110361 | DINAS PERKEBUNAN KAB. MUSI BANYUASIN	2.647.517.000	2.557.806.657	96,61	100
25	110563 | DINAS PERKEBUNAN KAB. MUARA ENIM	2.864.569.000	2.847.983.600	99,42	100
26	110765 | DINAS PERKEBUNAN KAB. MUSI RAWAS	2.422.456.000	2.391.941.062	98,74	100
27	110848 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	4.401.050.000	4.393.141.701	99,82	100
28	129072 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	1.303.880.000	1.280.669.000	98,22	100
29	129114 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	11.441.235.000	11.350.171.860	99,20	100
30	120461 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. LAMPUNG BARAT	5.525.611.000	5.465.112.400	98,91	100
31	120856 | DINAS PERKEBUNAN KAB. WAY KANAN	7.404.702.000	6.263.659.000	84,59	96

32	139076 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	848.150.000	795.501.246	93,79	100
33	139127 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	10.695.285.000	10.449.944.179	97,71	100
34	130254 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. SANGGAU	904.288.000	895.896.100	99,07	100
35	149067 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	949.940.000	920.511.800	96,90	100
36	149116 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	11.099.573.000	10.374.291.050	93,47	98
37	159064 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	850.800.000	823.289.190	96,77	100
38	159109 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	3.430.986.000	3.369.111.978	98,20	100
39	169066 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	565.580.000	550.273.750	97,29	100
40	169114 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	8.215.875.000	8.069.368.641	98,22	100
41	160461 | DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BERAU	1.386.180.000	1.313.478.000	94,76	98
42	161028 | DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	1.075.345.000	1.035.649.115	96,31	98
43	179062 | DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA	1.369.294.000	1.369.193.002	99,99	100
44	179105 | DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA	41.464.162.000	41.274.457.849	99,54	100
45	189084 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.117.218.000	1.098.447.800	98,32	100
46	189133 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	13.298.665.000	13.244.803.305	99,59	100
47	180345 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TOLI-TOLI	1.012.927.000	1.010.808.000	99,79	100
48	199078 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.525.950.000	1.511.826.722	99,07	100

49	199127 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	24.173.124.000	22.461.747.650	92,92	98
50	190638 | DINAS PERTANIAN KAB. TANA TORAJA	2.126.460.000	2.020.036.812	95,00	98
51	199411 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN WAJO	2.152.180.000	2.150.645.156	99,93	100
52	199572 | DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR	4.571.437.000	4.526.386.309	99,01	100
53	209008 | DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	1.494.820.000	1.412.557.800	94,50	100
54	209109 | DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	19.913.987.000	18.573.647.050	93,27	96
55	200477 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA	7.807.546.000	7.798.608.000	99,89	100
56	200831 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. KOLAKA UTARA	27.545.634.000	27.518.875.100	99,90	100
57	219001 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	1.095.647.000	1.094.255.078	99,87	100
58	219092 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	13.114.755.000	12.664.077.882	96,56	100
59	229061 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	922.642.000	890.056.358	96,47	100
60	229101 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	8.572.208.000	8.290.166.903	96,71	100
61	239072 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.071.195.000	1.059.573.475	98,92	100
62	239128 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	12.521.425.000	12.502.482.083	99,85	100
63	249031 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.309.349.000	1.284.457.000	98,10	100
64	249160 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	10.070.057.000	8.652.973.780	85,93	95
65	259060 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	1.410.470.000	1.117.924.900	79,26	100

66	259099 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	8.855.000.000	8.787.281.700	99,24	100
67	250164 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. JAYAPURA	2.295.040.000	2.279.013.500	99,30	100
68	269065 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	928.976.000	928.624.000	99,96	100
69	269111 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	2.396.467.000	2.395.599.531	99,96	100
70	260159 | DINAS PERKEBUNAN KAB. BENGKULU UTARA	1.884.967.000	1.792.702.300	95,11	100
71	289035 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	1.029.900.000	1.029.900.000	100,00	100
72	289105 | DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	21.746.855.000	21.676.951.765	99,68	100
73	299347 | DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	823.300.000	807.004.800	98,02	100
74	299382 | DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	3.320.014.000	2.123.802.650	63,97	85
75	309033 | DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.034.810.000	1.018.229.800	98,40	100
76	309165 | DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	19.550.976.000	19.207.605.144	98,24	100
77	319057 | DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	901.300.000	901.280.000	100,00	100
78	319090 | DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	8.938.683.000	8.930.492.600	99,91	100
79	329027 | DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	547.079.000	459.732.700	84,03	100
80	329079 | DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	685.338.000	634.773.800	92,62	95
81	330023 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	929.650.000	912.200.000	98,12	100
82	330024 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	9.469.284.000	9.231.473.000	97,49	100

83	330363 | DINAS PERKEBUNAN KAB. FAK-FAK	2.994.361.000	2.740.471.974	91,52	98
84	340999 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	596.210.000	556.584.500	93,35	100
85	341001 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	20.487.465.000	19.981.112.286	97,53	100
86	417669 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	769.870.000	723.550.110	93,98	100
87	417670 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	3.559.592.000	3.324.295.891	93,39	96
88	567338 | BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) SURABAYA	59.931.066.000	55.161.674.866	92,04	98
89	567408 | BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) MEDAN	52.014.337.000	41.070.564.341	78,96	90
90	567717 | BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) AMBON	23.906.547.000	21.902.101.868	91,62	98
91	567521 | BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK	11.402.205.000	10.520.902.040	92,27	96
92	238830 | DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	305.298.020.000	245.012.119.973	80,25	100
	TOTAL DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	**1.000.057.871.000**	**901.065.594.487**	**90,10**	

Perkembangan Realisasi Mou Bidang Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2020

Lampiran 6

BULAN	REALISASI
Februari	• Komitmen peningkatan ekspor produk jambu mete dengan perusahaan anggota Permetin (Perhimpunan Mete Indonesia) dengan Ditjen Perkebunan - PT. Java Mete - PT. Comextra Majora • Komitmen ekspor produk lada: - CV. Makro Jaya Lestari - PT. Panen Bangka Internasional - CV. Laris Jaya - CV. Lada Jaya Lestari - CV. Indo Bhakti Makmur - CV. Rahman Al Assad - PT. Bangka Alam Sejahtera - CV. Panen Baru
September	• Penandatanganan MoU kemitraan pemasaran produk perkebunan pada acara sosialisasi hasil sidang internasional di Palembang: - CV. Rerira Global Konsultan dengan kelompok tani gula aren - CV. Rerira Global Konsultan dengan kelompok tani sereh wangi - UKM kelapa tumbuh dgn uppk VCO - UKM Gasing Maju bersama dengan Gapoktan Kopra Putih "Tirta Mandiri" • Penandatanganan MoU kemitraan pemasaran sabut kelapa/cocofiber di Manado antara PT. Mahligai Indococo Fiber dengan 8 ketua kelompok tani kelapa di Sulawesi Utara

Oktober	• Penandatanganan MoU kemitraan pemasaran kopi Sumatera Barat antara PT. Surya Indosinga dengan 16 ketua kelompok tani/koperasi/UMKM kopi se-Sumatera Barat
November	• PT. Agro Mandiri Internusa dengan 16 ketua kelompok tani kelapa di Sumatera Selatan • CV. Amran Sulaiman dengan 16 ketua kelompok tani kelapa di Sumatera Selatan • PT. Mahligai Indococo Fiber dengan PT. Raksasa Cipta Niscala tentang kemitraan usaha dan pengolahan sabut kelapa di Sumatera Selatan
Desember	• Komitmen ekspor dalam rangka hari perkebunan ke-63 - PT. Tomcococha Indonesia dengan direktur PPHBUN (komitmen ekspor briket arang kelapa) - PT. Alamsari Interbuana dengan direktur PPHBUN (komitmen ekspor rempah) - CV. Frinsa Agrolestari dengan direktur PPHBUN (komitmen ekspor kopi) - Koperasi Kopi Indonesia Lestari/ISCC dengan dirjen perkebunan tentang pengembangan aplikasi ketelusuran komoditas kopi berbasis indikasi geografis

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL
Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon : 7800230, 7806131 - 34 Pesawat : 3204, 3206, 3214, 3216 Fax : 7800220, 7804856
Website : http://www.deptan.go.id/itjen/

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Draft Laporan Kinerja intansi pemerintah unit kerja Direktorat Jenderal Perkebunan untuk tahun anggaran 2020 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Perkebunan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, terdapat beberapa koreksi yang sudah kami sampaikan dalam Laporan Hasil Reviu Atas Draft Laporan Kinerja Unit Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2020. Dengan adanya perbaikan tersebut, maka tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 8 Februari 2021
Inspektur III,

Fuadi, Ak, MPA
NIP. 196701161988031001